

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013  
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN MAGETAN**  
(Studi Pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**TISHA WINDIANTY KUSUMA PUTRI**  
**NIM. 145030100111086**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2018**



## MOTTO

**“There is not a single proof that life is all about seriousness. Make your living as funny as possible.”**

Tisha Windianty Kusuma Putri

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat  
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan  
(Studi pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)

Disusun oleh : Tisha Windianty Kusuma Putri

NIM : 145030100111086

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 07 Juni 2018

**Komisi Pembimbing,**



**Dr. Siswidiyanto, MS**  
**NIP. 19600717 198601 1 002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro kabupaten Magetan)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 07 Juni 2018



Tisha Windianty Kusuma Putri  
145030100111086

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Juli 2018  
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Tisha Windianty Kusuma Putri  
Judul : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)

**Dan dinyatakan LULUS**

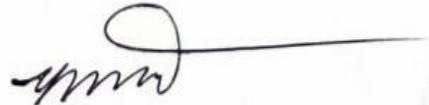
### MAJELIS PENGUJI

Ketua



**Dr. Siswidiyanto, MS**  
NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



**Drs. Minto Hadi, M.Si**  
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



**Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS**  
NIP. 19691002 199802 1 001

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku:

*Kepada Kedua Orang Tua Saya yang Tercinta*

*Bapak Sadikun dan Ibu Titik Untari*

*Atas Segala Perjuangan, Tetes Keringat, Kasih Sayang, dan Doa*

*dalam Mendidikku*

*Kepada Kedua Mas ku, Rendi Tico Aditya dan*

*Hamid Dimas Erviansyah*

*Yang Selalu Memberikan Dukungan dan Menghibur*

*Dengan Cara-Cara yang Sulit dideskripsikan*

## RINGKASAN

Tisha Windianty Kusuma Putri, 2018. **Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. Siswidiyanto, MS. (136+xvi hal)

---

Kebijakan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kurikulum 2013. KTSP diganti karena dianggap belum mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendidikan di Indonesia. SMPN 2 Sukomoro merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tingkat Menengah Pertama di Kabupaten Magetan yang mulai tahun ajaran baru 2017/ 2018 diwajibkan menggunakan kebijakan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro mengalami beberapa permasalahan meliputi sosialisasi kurikulum 2013, rendahnya pemahaman guru dan siswa terkait kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis data model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Magetan dan SMPN 2 Sukomoro sebagai situs penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan belum terlaksana dengan baik berdasarkan tahap implementasi menurut Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Hal ini dikarenakan belum berjalannya seluruh tahap implementasi dalam kebijakan kurikulum 2013. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan kurikulum 2013. Adapun faktor pendukung meliputi semangat belajar dari guru dan siswa, ketersediaan buku paket, Diklat yang dilakukan dinas terkait, dan sumber dana. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya sosialisasi, sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer, guru dan siswa masih menggunakan metode pembelajaran kurikulum, kurangnya sarana prasarana. Adapun saran peneliti yakni pihak Dinas Pendidikan lebih menggalakkan sosialisasi, pihak sekolah mengalokasikan dana untuk pembinaan guru dan siswa untuk melaksanakan pelatihan komputer, guru harus mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, dan Dinas Pendidikan menambahkan modul dan melengkapi sarana prasarana yang kurang.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Pendidikan, Kurikulum 2013**

## SUMMARY

Tisha Windianty Kusuma Putri, 2018. **The Policy of 2013 Curriculum Implementation in Junior High School Level of Magetan District (Study at SMPN 2 Sukomoro Magetan District)**. Thesis of Administration Public, Faculty of Administrative Science, Brawijaya University. Under the guidance of Dr. Siswidyanto, MS. (136+xvi pages)

---

Curriculum policy 2013 is the latest curriculum of education unit level curriculum (KTSP) which is stated in the law number 81A of 2013. The 2013 curriculum is applied because the previous curriculum of KTSP is considered as not being able to give maximum result to the education in Indonesia. SMPN 2 Sukomoro is the first education institution in Magetan district which starting from the new academic year of 2017/2018 required to use the policy of curriculum 2013. In the implementation of the policy of curriculum 2013 for junior high school level in SMPN 2 Sukomoro encountered several problems covering the socialization of the 2013 curriculum, the low understanding of teachers and students related to the 2013 curriculum. This study aims to describe and analyze the implementation of the curriculum policy of junior high school level in Magetan district, supporting factors and obstacles factors to the implementation of the 2013 curriculum policy.

This research using descriptive observation with a qualitative approach with data analysis techniques that is to use data analysis interactive model by Miles, Huberman and Saldana (2014), which consists of data collection, condensation, data presentation, and conclusion. The location of this research is Magetan Regency and SMPN 2 Sukomoro as research sites.

The result of the study shows that the implementation of curriculum policy in junior high school level in Magetan District has not been able to be categorized as good category based on the implementation stage of Charles O. Jones in Widodo (2012:91) which includes the stage of interpretation, organizing phase, and application stage. This is because it not run well throughout the implementation phase in the curriculum policy of junior high school level in Magetan district. There are supporting factors and obstacles in the implementation of curriculum policy 2013. The supporting factors include the spirit of learning from teachers and students, the availability of textbooks, the training conducted by related agencies, and sources of funds. Obstacles factors include lack of socialization, human resources who can not operate computer, teachers and students still use old learning methods that are not in accordance with the 2013 curriculum, lack of facilities and infrastructure. As for the researcher's suggestion that the education department is encouraging socialization, the school allocated fund for the development of teachers and students to carry out computer training, should be able to create a fun learning atmosphere, and the education office add module and complete the lack of infrastructure.

**Keywords: Implementation, Public Policy, Education, Curriculum 2013**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)”** Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M. AP, Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Siswidiyanto, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
6. Keluarga Besar SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung;
7. Keluarga besar Sukiman-Mariati yang selalu mengingatkan dan mendukung setiap langkah peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Bulik Anik Nurhayati yang dengan sabar memberikan bantuan kapanpun dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu;
9. Mbak Shintya Agustien Puteriana dan keponakanku Arsyila Febrianditya Arimbi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
10. Teman-teman seperjuangan yang sudah seperti keluarga: Anisa Nurma, Vera Widiawati, Agnes Ardini, Nevi Cindia, Ivani Cahaya N, dan Destina Tri A, yang selalu siap membantu di saat ada masalah;
11. Keluarga besar Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya, Kak Yessy Sukma, Panca Basuki, Rizal Dismantoro, Rhiezky Arniansya, Raymond Farandhi, Rizka Nur Latifah, Rizki Nur Latifah, Putri Indah, Arizal Indra, Ilfad Raffi) yang tidak hanya memberikan pengalaman berorganisasi dan membuat penulis memiliki keluarga baru tetapi juga

mengajarkan penulis arti saling memiliki, menjaga dan berbagi kesenangan serta kesedihan;

12. Teman-teman Administrasi Publik 2014, Anggita Wulansari, Intan Yulianti, Anisa Nurmalitasari, Tasyakurnia, Devi Sheila, dan Ricke Silva yang selalu mengingatkan pentingnya segera menyelesaikan skripsi ini;

13. Teman-Teman Fia Futsal Team 2014 Oxy Rindiantika Sari, Inggit Putri Milayanti, Nurul Apriyanti, Yualita Windi yang telah berproses bersama-sama dari yang bukan apa-apa sampai bisa berprestasi bersama dan membawa nama FIA UB;

14. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juni 2018

Tisha Windianty K

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik.....	20
B. Kebijakan Publik .....	21
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	21
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik .....	24
3. Implementasi Kebijakan Publik .....	26
4. Tahapan-Tahapan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	30
C. Kebijakan Pendidikan .....	31
1. Pengertian Kebijakan Pendidikan .....	31
2. Jenis-Jenis Kebijakan Pendidikan .....	33
a. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah.....	33
b. Kebijakan Pendidikan Umum, Khusus, dan Teknis .....	34
3. Nilai-Nilai Dasar dan Kriteria Kebijakan Pendidikan .....	36
4. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	39
a. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	40

5.	Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 .....	41
a.	Proses Kebijakan Kurikulum 2013.....	43
b.	Sumber Dana Kurikulum 2013 .....	46
c.	Tenaga Pendidik dan Perannya dalam Implentasi Kebijakan Kurikulum 2013 .....	47
d.	Upaya Pemerintah dalam Menunjang Kebijakan Kurikulum 2013 .....	49
D.	Kurikulum .....	50
1.	Kurikulum 2013 .....	52

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	54
B.	Fokus Penelitian .....	55
C.	Lokasi dan Situs Penelitian .....	56
D.	Sumber Data .....	57
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	58
F.	Instrumen Penelitian .....	60
G.	Teknis Analisis Data .....	61

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum .....	63
1.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	63
a.	Gambaran Umum Kabupaten Magetan.....	63
b.	Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Magetan.....	65
c.	Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan .....	66
1)	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran .....	66
2)	Struktur Organisasi .....	68
d.	Gambaran Umum SMPN 2 Sukomoro .....	70
1)	Visi, Misi, dan Tujuan.....	70
2)	Struktur Organisasi .....	72
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian.....	74
1.	Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan.....	76
a.	Persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 .....	79
1)	Sosialisasi Kurikulum 2013 .....	79
2)	Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013 ..	82
3)	Sumber Daya.....	85
b.	Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013.....	93
1)	Pelaksanaan Pembelajaran .....	93
2)	Penerimaan Siswa Terhadap kurikulum 2013 .....	99

2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013.....	103
1.	Faktor Pendukung.....	103
2.	Faktor Penghambat.....	105
C.	Pembahasan .....	108
1.	Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan .....	108
a.	Tahap Interpretasi.....	110
1)	Dokumen Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 .....	111
2)	Buku Panduan Akademik.....	113
b.	Tahap Pengorganisasian.....	116
1)	Sosialisasi.....	116
2)	Pendidikan dan Pelatihan .....	117
3)	Sumber Daya.....	118
4)	Aturan.....	121
c.	Tahap Aplikasi .....	123
1)	Pelaksanaan Pembelajaran .....	124
2)	Penerimaan Siswa terhadap Kurikulum 2013.....	125
2.	Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kurikulum 2013.....	126
a.	Faktor Pendukung.....	127
b.	Faktor Penghambat.....	127
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	129
B.	Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	134
<b>LAMPIRAN</b>		



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal.</b>
1.1	Data Pokok Persebaran Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan .....	11
1.2	Daftar Rombongan belajar SMP N 2 Sukomoro .....	13
4.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magetan .....	64
4.2	Data Lembaga Pendidikan Tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Magetan .....	65
4.3	Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Magetan.....	66
4.4	Data Pegawai SMPN 2 Sukomoro Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Pegawai .....	73
4.5	Daftar Jumlah Fasilitas yang Dimiliki SMPN 2 Sukomoro .....	73
4.6	Daftar Ekstrakurikuler SMPN 2 Sukomoro.....	74
4.7	SDM SMPN 2 Sukomoro berdasarkan Jabatan dan Jumlah .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal.
3.1	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	62
4.1	Bagan Struktur Organisasi SMPN 2 Sukomoro.....	72
4.2	Pelaksanaan Pendidikan dan Diklat Kurikulum 2013.....	85
4.3	Skema Penilaian Sikap Kurikulum 2013 .....	97
4.4	Dokumen Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/ 2018.....	113
4.5	Buku Panduan Akademik SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/ 2018 .....	115
4.6	Tahapan Pendekatan <i>Scientific</i> .....	125



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan globalisasi. Untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan, salah satunya pada bidang pendidikan. Pendidikan merupakan wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia selain itu pendidikan juga merupakan pondasi yang dapat menjadikan generasi muda cerdas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan Nasional mempunyai fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mutu pendidikan yang lebih baik dibutuhkan agar tujuan bangsa Indonesia untuk memiliki generasi muda yang cerdas dapat terwujud. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menjadikan pendidikan di Indonesia lebih baik dengan membuat kebijakan di bidang pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan usaha yang dapat dilaksanakan dalam sistem pembangunan di bidang pendidikan berupa

pemerataan pendidikan sekaligus pemerataan kualitas pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan yaitu melalui peningkatan kualitas pendidik, pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan yang dijadikan acuan oleh pemerintah dan setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Karena kurikulum merupakan salah satu dasar dan aspek penting dalam pendidikan dan kurikulum harus terus berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan jaman maka kurikulum terus diperbarui dan kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan diberlakukan bagi seluruh anak bangsa di seluruh Indonesia.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU No. 20 Tahun 2003: tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam pengertian tersebut kurikulum merupakan seperangkat rancangan, landasan, model, pedoman dan sistem pembelajaran yang berorientasi pada tujuan sesuai jenjang pendidikan.

Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak pergantian kurikulum seperti yang dijelaskan dalam website kemendikbud.go.id. Dalam pergantian kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum 1985 yang berlaku sampai akhir tahun 1993, kurikulum 1994 yang berlaku sampai akhir tahun 1996, revisi dari kurikulum 1994 yang berlaku sampai akhir tahun 2003, rintisan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang berlaku sampai akhir tahun 2005, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku sampai akhir tahun 2012, hingga kurikulum 2013 yang dijalankan sampai saat ini. Menurut para pakar perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia dan di berbagai negara lainnya disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang tiap tahunnya selalu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan tuntutan jaman.

Memasuki pertengahan tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan kurikulum 2013 (K-13) sebagai upaya meningkatkan sistem pembangunan di bidang pendidikan kearah yang lebih baik untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Penerapan kurikulum baru ini dipandang sebagai salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi siswa, maka tujuan diterapkannya kurikulum 2013 dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrument untuk mengarahkan siswa menjadi manusia berkualitas dan kompeten untuk menjawab tantangan zaman. Sebelum menerapkan kurikulum 2013, sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan

kurikulum 2006. Pergantian kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 lebih mengacu kepada perubahan pola pikir (*mindset*).

Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada bulan Juli tahun ajaran 2013/2014 yang merupakan tahun ajaran baru bagi satuan pendidikan. Pedoman pelaksanaan kurikulum 2013 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan di beberapa sekolah diawali pada kelas I dan kelas IV SD/MI, kelas VII SMP/MTs, dan kelas X SMA/MA. Pemerintah mengadakan sosialisasi Kurikulum 2013 kepada DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat. Pemerintah juga memberikan Pelatihan Kurikulum 2013 kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas (Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013).

Perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 tentunya sudah direncanakan oleh pemerintah dengan berbagai tindakan. Adanya perubahan kurikulum ini memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013 ini. Sasaran pembelajaran dalam Kurikulum 2013 telah memenuhi tiga ranah yang memenuhi standar kompetensi lulusan yang harusnya ada pada diri siswa, yaitu ranah kognitif, pengetahuan dan ranah psikomotorik, ketrampilan, serta ranah afektif, sikap. Ada dua jenis mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu mata pelajaran wajib dan pilihan. Mata pelajaran wajib dan pilihan hanya dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan

SMK) sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis siswa usia 7 – 15 tahun, maka matapelajaran pilihan belum diberikan untuk siswa SD dan SMP.

Kurikulum 2013 memang memiliki konsep menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya sekolah-sekolah di Indonesia menerapkan kurikulum 2013 karena berbagai alasan seperti:

1. Perubahan sarana dan prasarana yang harus terpenuhi;
2. Kesiapan dari siswa sendiri;
3. Penambahan jam belajar mengajar.

Kurikulum 2013 yang sudah mulai diterapkan pada awal tahun ajaran 2013/2014 di berhentikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179432/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember tahun 2014. Pemberhentian pelaksanaan kurikulum 2013 ini didasarkan pada hasil evaluasi dari kurikulum 2013 pada tingkat pusat, dimana tim evaluasi kurikulum menemukan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 masih banyak kekurangan. Adapun kekurangan kurikulum 2013 yang ditemukan oleh tim evaluasi yang disampaikan pada pertemuan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kamis, 22 Januari 2015 menjabarkan bahwa masih ada dua masalah utama yang menjadi permasalahan dalam penerapan kurikulum 2013 sehingga tidak bisa berjalan efektif. Dua masalah tersebut yaitu, kesalahan tulis dalam buku sekolah dan penilaian sikap yang kurang objektif.

Menyikapi hasil evaluasi kurikulum 2013 tersebut, Suyatno selaku Ketua Tim Evaluasi Kurikulum 2013 menjelaskan, kesalahan tulis dalam buku sekolah berupa inkonsistensi dalam kompetensi dasar dimana seharusnya silabus dicetak terlebih dahulu baru diterapkan, namun kenyataannya dilapangan justru sebaliknya. Sedangkan dalam penilaian sikap dilakukan oleh teman sendiri dimana ini dirasa kurang objektif karena kebanyakan siswa telah melakukan kesepakatan untuk saling memberikan nilai yang baik. Serta kurang siapnya tenaga pengajar dan peserta didik dalam menerapkan kurikulum 2013 juga menjadi masalah dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Permasalahan kurikulum 2013 yang disampaikan pada saat pertemuan ini tidak hanya terjadi di daerah pusat saja melainkan juga seluruh sekolah yang menjadi *pilotting* di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga yang juga menghadiri pertemuan di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa hal-hal yang dievaluasi dalam kurikulum 2013 bukan hanya dokumen tetapi mulai dari ide, dokumen, serta implementasi semuanya dievaluasi. Guna mewujudkan evaluasi yang menyeluruh Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Ramon Mohandas mengatakan, kedepannya Kemendikbud akan melakukan lokakarya keseluruh sekolah percontohan yang berperan langsung dalam penerapan kurikulum 2013 untuk usaha perbaikan kurikulum 2013.

Pemberhentian kurikulum 2013 dan kembali berlakunya kurikulum 2006 ini tidak berlaku bagi seluruh sekolah percontohan. Melainkan hanya

untuk sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum 2013 kurang dari tiga semester. Sedangkan bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan kurikulum 2013.

Pemberhentian kurikulum 2013 pada Desember 2014 menimbulkan Pro dan Kontra tentang kurikulum 2013, yang kemudian setelah dilakukan perbaikan kurikulum 2013, pada awal tahun ajaran baru 2017/ 2018 Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud) menerbitkan SK Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017. Dimana melalui surat keputusan tersebut kurikulum 2013 kembali diterapkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah di Indonesia mulai dari Satuan Pendidikan Dasar sampai Satuan Pendidikan Menengah Atas tanpa ada lagi sekolah percontohan.

Mencermati fenomena di atas dan kondisi pelaksanaan Kurikulum 2013 di setiap satuan pendidikan semenjak kurikulum 2013 diberlakukasn pada tahun ajaran 2013/2014, kemudian diberhentikan dengan alasan peninjauan ulang dan kemudian diberlakukan kembali pada tahun 2017, yang menjadi sorotan penulis yakni bahwa sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan pemerintah perihal perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dirubah dengan kurikulum 2013 yang telah diterapkan sejak tahun 2014

tersebut. Dalam hal ini kebijakan tersebut perlu dilaksanakan dilapangan. Pelaksanaan kebijakan tersebut, penulis memfokuskan untuk melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Magetan yang tertuju pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan sudah dituliskan dalam Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 sebagai tindak lanjut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013. Dengan ini terdapat didalamnya yaitu bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magetan diminta untuk melaksanakan tiga hal, yaitu menyiapkan anggaran penggandaan dan pendistribusian buku semester II tahun pelajaran 2016/2017 sampai ke sekolah untuk kelas jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh daerah khususnya di Kabupaten Magetan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magetan diharuskan memiliki anggaran dalam APBD Tahun Ajaran 2017 yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kurikulum 2013. Khususnya untuk kegiatan penggandaan dan distribusi buku, pelatihan guru sasaran serta untuk melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Penerapan kurikulum 2013 yang diaplikasikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama menimbulkan beberapa permasalahan, kendala dan hambatan yang terjadi secara keseluruhan karena kurikulum 2013 yang berbasis pembelajaran tematik dianggap terlalu sulit untuk siswa di Tingkat

Sekolah Menengah Pertama. Kurikulum 2013 telah 3 tahun lebih bergulir dan relative masih baru di Kabupaten Magetan, sehingga dalam implementasinya belum seperti yang diharapkan. Karena pada awal pelaksanaannya pada tahun 2014 lalu hanya sebagian Sekolah Menengah Pertama saja yang menerapkan kurikulum ini tidak seluruh Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan yang menerapkan.

Penerapan kurikulum 2013 pada awalnya yang dijadikan prioritas sasaran implementasi kurikulum 2013 adalah Sekolah Menengah Pertama eks-RSBI dan sekolah terakreditasi A. Mendikbud merilis ada 6.410 sekolah di Indonesia eks-RSBI dan terakreditasi A yang akan menjadi sasaran implementasi kurikulum 2013 untuk seluruh tingkat satuan pendidikan. Untuk Sekolah Menengah Pertama ada 1521 yang akan dijadikan prioritas sasaran dan di Kabupaten Magetan hanya ada 3 Sekolah Menengah Pertama yang dijadikan prioritas sasaran kurikulum 2013. Adapun 3 Sekolah Menengah Pertama yang dijadikan prioritas sasaran adalah, SMPN 1 Magetan, SMPN 1 Kawedanan, SMPN 1 Maospati dan sisanya masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP).

Sedikitnya jumlah Sekolah Menengah Pertama yang menjadi *Pilot Project* dalam penerapan kurikulum 2013 ini juga dikarenakan sebagian besar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan belum memiliki fasilitas yang mencukupi di bidang teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang terlaksananya kurikulum 2013. Seperti yang diutarakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, Yussy Hermawan kepada wartawan Okezone, “Memang sebagian besar sekolah

penyelenggara tingkat SMP tidak dapat menerapkan kurikulum 2013 dikarenakan hanya sebagian kecil sekolah yang siap dan memiliki fasilitas yang dapat menunjang terlaksananya kurikulum 2013.”

Data jumlah sekolah dalam Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan, Kabupaten Magetan memiliki jumlah Sekolah Menengah Pertama paling sedikit dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur dengan 55 unit sekolah dan jumlah murid 19.462 orang. (<https://jatim.bps.go.id>). Dengan jumlah Unit dan jumlah murid pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama dapat dikatakan tingkat partisipasi Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Sebagian anak berusia 13-15 tahun di Kabupaten Magetan belum berpartisipasi dalam tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Kemendikbud menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah anak berusia 13-15 tahun di Kabupaten Magetan Mencapai 29.106 anak, sedangkan yang sudah berpartisipasi dalam Sekolah Menengah Pertama baik formal maupun nonformal hanya 19.462 anak. (<http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>)

Masalah lain yang dihadapi dunia pendidikan tingkat Sekolah Menengah Peratama di Kabupaten Magetan adalah tidak meratanya persebaran siswa. Dimana banyak sekolah-sekolah unggulan di Kabupaten Magetan yang menerima peserta didik melebihi kuota sekolah. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah non unggulan mendapatkan peserta didik jauh dibawah kuota yang ditentukan. Persebaran peserta didik yang tidak merata menyebabkan

kesenjangan yang antara sekolah unggulan dan non unggulan baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, dan prestasi sekolah.

**Tabel 1.1 Data Pokok Persebaran Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan**

No	Wilayah	Jumlah Siswa
1.	Kec. Magetan	3.504
2.	Kec. Maospati	1.944
3.	Kec. Kawedanan	1.623
4.	Kec. Plaosan	1.112
5.	Kec. Barat	1.352
6.	Kec. Parang	1.225
7.	Kec. Panekan	954
8.	Kec. Karangrejo	1.384
9.	Kec. Karas	707
10.	Kec. Takeran	377
11.	Kec. Poncol	768
12.	Kec. Sidorejo	450
13.	Kec. Sukomoro	734
14.	Kec. Lembeyan	440
15.	Kec. Bendo	790
16.	Kec. Kartoharjo	294
17.	Kec. Ngariboyo	196
18.	Kec. Nguntoronadi	528

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id> tahun 2017

Faktor yang menentukan sukses atau tidaknya kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan adalah kesiapan dari elemen sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Namun banyak kepala sekolah, guru, dan siswa yang menemui kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013. Dimana kepala sekolah belum mampu mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang tersedia.

Permasalahan penerapan kurikulum 2013 tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Letak Sekolah Menengah Pertama
2. Kesenjangan antara sekolah yang sudah menjadi *pilot project* dan sekolah menengah pertama mandiri
3. Persebaran layanan pendidikan di Kabupaten Magetan yang tidak merata.
4. Persoalan kekurangan siswa pada sekolah tingkat pertama pada daerah tertentu di Kabupaten Magetan
5. Banyaknya sekolah yang melayani siswa luar wilayah normatifnya terindikasi karena distribusi layanan fasilitas pendidikan sekolah yang ada belum sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah kabupaten Magetan.

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan dapat dikatakan belum siap dalam menerapkan pembelajaran Kurikulum 2013. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah yang dinaungi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sejauh ini belum optimal dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, pengarahan dan pengawasan yang terintegrasi kepada sejumlah Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.

Di SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan, program Kurikulum 2013 baru dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2017/2018. SMPN 2 Sukomoro yang sebenarnya mampu menerima murid untuk kapasitas 9 rombongan belajar dimana masing-masing rombongan belajar mampu menampung siswa

sebanyak 40 orang hanya memiliki jumlah murid keseluruhan sebanyak 151 orang siswa yang terbagi ke dalam enam rombongan belajar (rombel) sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Data Romboongan Belajar (Rombel) SMPN 2 Sukomoro**

Uraian	Rombel 7			Rombel 8			Rombel 9		
	L	P	Tot	L	P	Tot	L	P	Tot
Jumlah	28	14	42	31	21	52	28	29	57

Sumber: Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2018

Pelaksanaan program Kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro masih menuai pro dan kontra bagi masyarakat, orang tua murid, dan tenaga pegajar dikarenakan SMPN 2 Sukomoro merupakan Sekolah Menengah Pertama yang bukan sekolah unggulan yang baru melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini. Dimana ada 3 kriteria yang dibutuhkan agar sekolah dinyatakan layak untuk menerapkan kurikulum 2013 sebagaimana tertuang dalam pedoman pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu, Sekolah Menengah Pertama harus Terakreditasi A, ketersediaan buku kurikulum 2013, dan kesiapan kepala sekolah maupun guru untuk menerapkan kurikulum 2013.

Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro Dra. Sri Hari Suyanti, M.Pd mengatakan, Pada kenyataannya SMPN 2 Sukomoro belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah terutama pada kriteria ketiga, dimana kepala sekolah dan guru masih belum siap karena persiapan yang dilakukan dirasa masih kurang, sebelum pelaksanaan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro kepala sekolah dan guru hanya mengikuti Diklat

kurikulum 2013 selama seminggu yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sehingga masih bingung dalam menerapkan kurikulum 2013 terutama pemahaman tentang pendekatan *scientific* yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar.

Hal serupa juga dikatakan oleh Sudiro S.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dimana SMPN 2 Sukomoro belum memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, padahal sarana dan prasarana ini merupakan salah satu alat kelengkapan terlaksananya kurikulum 2013. Selain minimnya sarana dan prasarana, masalah lainnya adalah guru dan siswa di SMPN 2 Sukomoro juga kurang menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang seharusnya dapat digunakan oleh guru dan siswa dalam menunjang proses belajar mengajar, dimana dalam kurikulum 2013 guru dan siswa dituntut untuk lebih mandiri dalam mencari dan menguasai materi. Siswa kelas VII juga kesulitan dalam menerima pelajaran dengan kurikulum 2013 ini karena dalam kurikulum 2013 terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa.

Implementasi Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi Kurikulum 2013 khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan sejauh ini belum berjalan efektif dan masih diperlukannya evaluasi implementasi. Berdasarkan latar belakang dan konteks permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “**Implementasi Kebijakan Kurikulum**

**2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Kasus Pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada SMPN 2 Sukomoro)
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada SMPN 2 Sukomoro)

**C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro)

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada SMPN 2 Sukomoro)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

##### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi kurikulum 2013 khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagai bentuk usaha mewujudkan generasi muda yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pustaka bagi civitas akademik, bagi peneliti dan pembaca yang ingin mengkaji tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 serta menjadi acuan peningkatan mutu pendidikan dan merupakan salah satu pola pengembangan pendidikan dalam menghadapi modernisasi. Serta sebagai bahan pembelajaran dan khazanah keilmuan dalam bidang penelitian mengenai implementasi kurikulum 2013.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian skripsi ini terdiri dari tiga bab yaitu:

### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang masalah menjelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi peneliti ingin meneliti program implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan. Oleh karena rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana implementasi kebijakan dan faktor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan tersebut, sehingga tujuan dari penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini dalam hal teoritis maupun praktis.

### BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi kebijakan digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Berkaitan dengan isis dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah

menengah pertama peneliti menggunakan teori mengenai kebijakan publik, kebijakan pendidikan, dan tahap implementasi kebijakan

### BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan focus penelitian yang disesuaikan dengan yang ada di lapangan dan dengan teori implementasi kebijakan. Lokasi dan situs penelitian dilakukan di Kabupaten Magetan, SMPN 2 Sukomoro. Penentuan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang diambil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif.

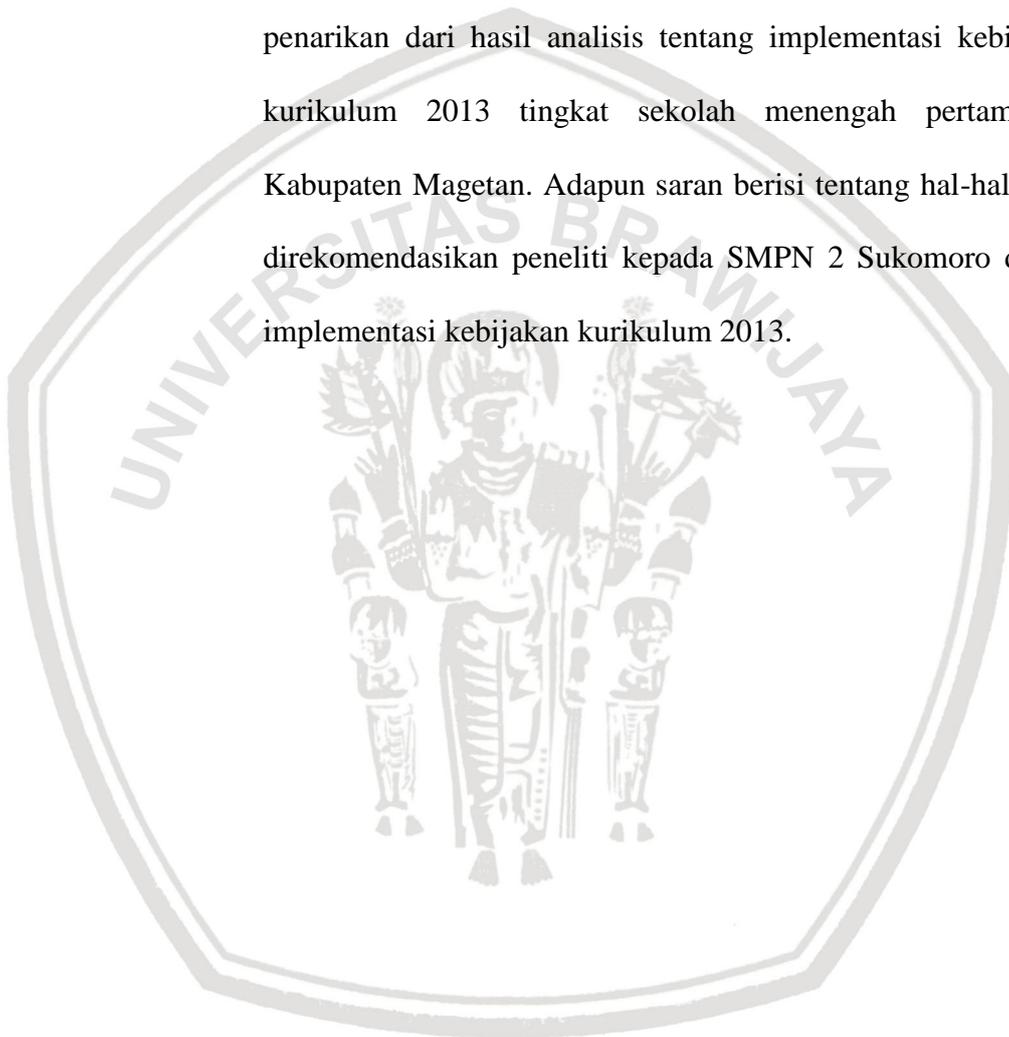
### BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Memuat tentang hasil penelitian yang menyajikan data umum yang memuat gambaran objek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian serta penyajian data yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang kemudian dianalisis. Adapun data yang digunakan sesuai dengan fokus tentang implementasi kebijakan dan faktor pendorong serta penghambatnya. Bab ini

sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diuraikan.

#### BAB V : Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi penarikan dari hasil analisis tentang implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan. Adapun saran berisi tentang hal-hal yang direkomendasikan peneliti kepada SMPN 2 Sukomoro dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Istilah administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministre*” yang berarti “*to serve*” dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan menurut pendapat A. Dunsire yang dikutip kembali oleh Keban (2008: 2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahannya, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik. Pengertian publik menurut Syafi’ie dkk dalam Pasolong (2006: 11) adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban (2008: 4) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau

sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat, karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah.

## **B. Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus mempunyai *output* yang signifikan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

Terdapat banyak batasan atau definisi dari apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dari para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Definisi kebijakan publik yang

dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Pengertian lain menurut Carl Friedrich (dalam Winarno 2007: 17) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud tertentu.

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Winarno mengungkapkan definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Winarno (2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Definisi ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Amir Santoso dalam Winarno (2007: 19), yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu:

*Pertama*, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan.

Pegertian lain juga diungkapkan Effendi dalam Syafiie (2006: 106) yang mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif anggota legislatif, lembaga pengadilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Pendapat-pendapat dari para ahli diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan kebijakan

publik sangat diperlukan karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

## 2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik Menurut Winarno merupakan proses yang kompleks karena melihat banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Adapun tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut:

### a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini kemungkinan ada masalah yang tidak disentuh sama sekali dan ada masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah yang ditunda untuk waktu yang lama karena adanya alasan-alasan tertentu.

### b. Tahapan Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut datang dari berbagai alternative atau pilihan

kebijakan (*policy alternative/ policy options*) yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah sebagaimana yang juga terjadi dalam tahap perumusan kebijakan. Pada tahap ini masing-masing aktor pembuat kebijakan akan bersaing mengutarakan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanyanakan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang telah dimobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk melihat dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa dalam perumusan kebijakan publik tidaklah mudah dan cepat. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada alam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu dalam menentukan kebijakan para aktor harus benar-benar mengkaji dengan tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.

### 3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-Undang, Implementasi mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-

program. Disisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcome*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2005: 64) menyatakan bahwa implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier dalam Joko Widodo (2001: 192) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan pengadilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang

bersangkutan. Menurut Ripley dalam Winarno (2002: 148-149) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefits*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi menunjuk pada setiap kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah yang mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang membuat suatu program berjalan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Indiahono (2009: 143) implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah sebenarnya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Badan-badan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak bagi warga negaranya. Namun pada praktiknya badan-badan pemerintah justru sering mendapat pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari

undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Dalam memutuskan untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah harus mengkajinya terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Berhasil atau gagalnya suatu kebijakan dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pengertian-pengertian mengenai implementasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi berarti menunjukkan seluruh upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik melalui sistem baru dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dalam suatu kebijakan atau program yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, sebab melalui prosedur implementasi ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Implementasi ini sendiri akan menghasilkan suatu akibat dan memberikan hasil yang bersifat dan memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap suatu keputusan kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Tahapan-Tahapan dalam Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam implementasi kebijakan, ketika kebijakan harus diimplementasikan, seperti yang disampaikan Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) tentang proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

##### a. Tahap Interpretasi

Merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan umum atau kebijakan manajerial dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan). Tahap interpretasi merupakan aktivitas menjelaskan substansi dari suatu kebijakan kedalam bahasa yang lebih operasional yang mudah dipahami.

##### b. Tahapan Pengorganisasian

Tahap ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana, dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan. Tahap pengorganisasian juga merupakan tahapan penyusunan kembali atau menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya

mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan.

c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan aktifitas penerapan penyediaan pelayanan secara rutin sesuai tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Tahapan ini merupakan wujud dari pelaksana masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Penjelasan mengenai tahap implementasi menurut Widodo diatas, tahap interpretasi meliputi upaya organisasi menjabarkan kebijakan umum menjadi aturan teknis sehingga substansinya lebih mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya tahap pengorganisasian meliputi pelaksana kebijakan sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya anggaran atau dana, serta peraturan pelaksanaan kebijakan. Tahap aplikasi meliputi penerapan kebijakan oleh para pelaku kepada kelompok sasaran sesuai dengan aturan.

## C. Kebijakan Pendidikan

### 1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Terdapat banyak batasan atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan. Secara umum kebijakan atau *policy*

digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu. Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pendidikan (*educational regulation*) namun istilah-istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut sebenarnya masih memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108).

Menurut Riant Nugroho (2008: 370) kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara dan bangsa secara keseluruhan.

Menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi

dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Dilihat dari uraian menurut beberapa ahli mengenai kebijakan pendidikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

## **2. Jenis-Jenis Kebijakan Pendidikan**

### **a. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah, berikut penyempurnaannya, urusan pemerintahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat) dan urusan pemerintahan daerah (provinsi, daerah, kota). Urusan pendidikan sesuai pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Artinya kebijakan pendidikan bersifat desentralistik, kendati demikian kebijakan pendidikan tidak secara otomatis bersifat

desentralistik, ada kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik, terutama jika dilihat dari level kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan.

Kebijakan pendidikan sentralistik disebut juga sebagai kebijakan pendidikan pada tingkat nasional (*national policy level*). Kebijakan yang berada pada level nasional ini, disebut juga kebijakan administrative yang perumusannya ada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sementara kebijakan pendidikan yang bersifat desentralistik, yakni level kebijakan pendidikan daerah, wujud kebijakan pendidikan daerah adadua macam yaitu, *pertama*, Perda (peraturan daerah), tentang pendidikan yang perumusannya berada ditangan eksekutif (bupati/ walikota) dan legislatif atau mitra bupati/ walikota, yakni DPRD. *Kedua*, keputusan/ peraturan bupati/ walikota tentang pendidikan.

**b. Kebijakan Pendidikan Umum, Khusus, dan Teknis**

Kebijakan pendidikan yang bersifat umum (*general policy level*), merupakan kebijakan pendidikan eksekutif, oleh karena itu yang menentukan adalah mereka yang berada di posisi eksekutif, dan yang termasuk kedalam kebijakan ini adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Keputusan, Peraturan, dan Instruksi Presiden

Kebijakan pendidikan yang bersifat khusus (*special policy level*). Tingkat kebijakan ini letak penentuannya ada di tangan Menteri Pendidikan. Kebijakan pendidikan bersifat khusus ini dibuat oleh Menteri Pendidikan dengan mendasarkan kebijakan yang berada di atasnya, berupa keputusan bersama dengan Menteri, atau berupa peraturan Menteri Negara.

Kebijakan pendidikan teknis (*Technical policy level*). Sifat kebijakan pendidikan teknis lazim disebut kebijakan operatif, dikatakan sebagai kebijakan operatif, karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentuan kebijakan pendidikan ini berada pada tangan pejabat eselon 2 kebawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non departemental. Produk kebijakan ini berupa peraturan, keputusan, dan instruksi pimpinan lembaga.

Terdapat pula kebijakan pendidikan yang bersifat mikro. Termasuk dalam kebijakan pendidikan yang bersifat mikro adalah berbagai peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pimpinan lembaga pendidikan, misalnya kepala sekolah. Kebijakan pendidikan ini mencakup berbagai keputusan yang dibuat oleh Dewan atau Komite Sekolah

### 3. Nilai-Nilai dasar dan Kriteria Kebijakan Pendidikan

Mengadopsi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ketika merumuskan suatu kebijakan pendidikan, sekurang-kurangnya ada enam nilai dasar kebijakan pendidikan, antara lain:

- a. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat cerdas;
- b. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus bersifat bijaksana;
- c. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memiliki harapan baru;
- d. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus terfokus pada rakyat;
- e. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus memberi motivasi;
- f. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus produktifitas, memiliki kualitas.

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yang harus terpenuhi, yakni:

- a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

e .Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya (Ali Imron, 1995: 20).

#### 4. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan menurut Grindle (1984) dalam Sudiyono (2007:77), implementasi kebijakan pendidikan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan tersebut. Lebih jauh Grindle menjelaskan bahwa pengukuran implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada aksi.

Menurut Udoji dalam Agustino (2006:154), implementasi kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang penting bahkan jauh lebih penting dibandingkan perumusannya. Implementasi pendidikan hanya sekedar impian atau rencana sempurna yang tersimpan apabila tidak diimplementasikan. Proses implementasi kebijakan pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pendidikan dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya

berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

#### **a. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan sesuai kerangka peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tentang pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan daerah, langkah-langkah nya sebagai berikut:

- a. Penyiapan Implementasi Kebijakan Pendidikan (0 s.d. 6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah (birokrasi), maupun publik (masyarakat). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara: penyebarluasan kepada publik melalui media masa elektronik, media cetak, dan temu publik.
- b. Implementasi kebijakan pendidikan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan (*policy refinement*) apabila diperlukan.
- c. Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah uji coba selesai disertai pengawasan dan pengendalian.

- d. Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilaksanakan evaluasi kebijakan pendidikan.

## 5. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

Implementasi kurikulum menurut Abdul Majid (2014: 7) adalah sebagai operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Implementasi kurikulum sebagai upaya guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam silabus dan rencana pembelajaran. Jadi implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai penerapan dari ide, program, dan rancangan kurikulum yang masih bersifat tertulis sebagai bahan pedoman bagi guru ke dalam aktivitas/tingkah laku nyata pada proses pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum.

Implementasi Kurikulum 2013 menjadi hal yang baru bagi dunia pendidikan Indonesia setelah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum 2006. Mulai Tahun Ajaran 2013/2014 diberlakukan Kurikulum 2013 secara terbatas di sekolah-sekolah *piloting* yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai sebuah kurikulum baru, pelaksanaan kurikulum 2013 ini tentunya membawa konsekuensi yang berbeda bagi pelaksana kurikulum di sekolah.

Pelaksanaan kurikulum 2013 memerlukan berbagai penyesuaian dalam berbagai aspek, menurut Marsh (2009: 93), pelaksanaan setiap kurikulum baru akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi guru

karena guru harus menyesuaikan kompetensinya dan juga kepercayaan dirinya dalam penggunaannya. Hal tersebut hanya berlaku jika kurikulum baru tersebut benar-benar diterima oleh guru di sekolah.

Selanjutnya Kemendikbud (2013: 92) menjelaskan bahwa dalam implementasi Kurikulum 2013 harus berbasis pada prinsip manajemen kurikulum sebagai berikut:

- a. Implementasi kurikulum sebagai perwujudan kerjasama antar tingkatan pemerintah dari pusat hingga daerah;
- b. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah serta melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum;
- c. Pemerintah propinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum;
- d. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/ kota terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implementasi kurikulum adalah kegiatan mempraktikan atau menerapkan suatu ide, program atau seperangkat kegiatan yang baru untuk individu atau organisasi yang menggunakan kurikulum, di mana implementasi kurikulum tersebut mencakup tiga kegiatan pokok yakni pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penerapan Kurikulum 2013 yang dimulai pada awal Tahun Ajaran Baru 2013/ 2014 dan diberhentikan sementara pada Desember 2014 karena dinilai gagal. Seperti yang disampaikan oleh Retno Listyarti seorang guru yang diminta review tentang implemntasi kurikulum 2013 saat rapat perdana revisi kurikulum 2013 pada 19 November 2014

bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Kekurangan kurikulum 2013 menurut Anies Baswedan merupakan buah dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa.

Implementasi Kurikulum 2013 seharusnya difokuskan pada 6.221 unit sekolah yang dijadikan percontohan terlebih dahulu. Kemudian *feedback* dari sekolah percontohan tersebut dianalisa Kemendikbud. Tetapi yang terjadi justru kurikulum 2013 tersebut dipaksakan untuk diterapkan oleh 200.000 lebih sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru 2014/2015. Kemudian justru kurikulum 2013 diberhentikan pada bulan Desember 2014 karena dianggap gagal.

Pada tahun ajaran baru 2017/ 2018 kurikulum 2013 kembali diterapkan untuk seluruh sekolah di Indonesia setelah dilakukan berbagai evaluasi dan perbaikan. Namun penerapan kembali kebijakan kurikulum 2013 pada tahun 2017 belum dapat dikatakan berhasil atau gagal karena belum diadakan evaluasi kembali.

#### **a. Proses Kebijakan Kurikulum 2013**

Pelaksanaan Kurikulum 2013 tentu saja melalui berbagai proses sebelum diterapkan oleh satuan pendidikan di Indonesia. Mulai dari proses awal pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 berdasar surat Keputusan Mendikbud No. 015/P/2013. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun

2013 tentang Implementasi Kurikulum. Kemudian kurikulum 2013 diberhentikan sementara berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179342/MPK/KR/2014, sampai dengan diberlakukannya kembali kurikulum 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen tentang Penetapan Kembali Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016.

Adapun runtutan proses kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Januari 2013, Pembentukan tim penyusun kurikulum 2013 berdasar Surat Keputusan Mendikbud No. 015/P/2013;
2. April 2013, Inspektur Jendral Kemendikbud berkirim surat kepada Mendikbud memperingatkan apabila persiapan belum diyakini maka pelaksanaan kurikulum baru perlu ditunda mengingat waktu semakin sempit;
3. Juli 2013, Penerapan kurikulum 2013 di 6.221 sekolah sasaran. Persiapan guru inti dan sasaran dengan menerapkan pelatihan berjenjang selama lima hari dan bersamaan dengan waktu dimulainya tahun ajaran baru 2013/2014. Buku Kurikulum 2013 belum siap kecuali tiga buku yang sudah selesai ditulis yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah;
4. September 2013, Survei persepsi terhadap kepala sekolah, guru, orangtua, dan siswa disekolah sasaran, dua bulan setelah

kurikulum 2013 diterapkan. Tidak ada lagi survei/ evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kurikulum 2013 sampai berakhirnya tahun ajaran 2013/ 2014;

5. Juli 2014, Penerapan kurikulum 2013 diseluruh sekolah;
6. Agustus 2014, Buku semester satu belum didistribusikan ke lebih dari 60.000 sekolah;
7. Oktober 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N0. 159 Tahun 2014 untuk mengevaluasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh baru dikeluarkan;
8. November 2014, Buku semester 1 Kurikulum 2013 belum diterima di 19% kabupaten/kota untuk tingkat SD, 32% kabupaten/kota untuk tingkat SMP, dan 22% kabupaten/kota untuk tingkat SMA dan SMK;
9. Desember 2014, berdasarkan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179432/MPK/KR/2014 kurikulum 2013 diberhentikan sementara dikarenakan banyak sekolah yang belum siap menerapkan kurikulum 2013, namun bagi sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan kurikulum 2013 sedangkan sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 selama satu semester kembali menggunakan kurikulum KTSP;

10. April 2017, Surat Keputusan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen tentang Penetapan Kembali Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016;
11. Juli 2017, Penerapan kembali kurikulum 2013 pada seluruh tingkat sekolah di Indonesia bersamaan dengan Tahun ajaran baru 2017/ 2018.

**b. Sumber Dana Kebijakan Kurikulum 2013**

Dana operasional yang digunakan untuk kebijakan kurikulum 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendikbud sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Tahun 2013 untuk Guru SD dan SMP, dibiayai oleh Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar melalui kegiatan pembinaan karir PTK Dikdas Direktorat Pendidik dan Tenaga Pendidikan Pendidikan Dasar berjumlah 91.280 untuk Kepsek/ Guru SD dan 137.480 Guru SMP.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah

Pemberian Bantuan Dana Implementasi Kurikulum Tahun 2013 untuk Guru SMA yang berjumlah 34.605 Guru dibiayai oleh Direktorat Pembinaan SMA. Sedangkan Pemberian Bantuan Dana Implementasi Kurikulum Tahun 2013 untuk Guru SMK

yang berjumlah 29.625 Guru SMK dibayai oleh Direktorat Pembinaan SMK. Sedangkan, bantuan dana bimtek implementasi kurikulum 2013 untuk Kepala Sekolah SMA/ SMK dan Guru Bimbingan Konseling dibiayai oleh Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.

3. Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemberian Bantuan Diklat Implementasi Kurikulum Tahun 2013 untuk Guru dan Kepala Sekolah SD/ SMP yang berjumlah 243.203 orang dibiayai oleh Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan yang disalurkan melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

**c. Tenaga Pendidik dan Perannya dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013**

Seperti yang diketahui kurikulum memiliki 2 sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai dokumen kurikulum berperan sebagai pedoman guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan demikian kurikulum sebagai sebuah dokumen dngan proses pembelajaran sebagai implementasi dokumen tersebut merupakan dua

sisi yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling meng-*ada* dan *meniada*-kan ada. Dalam kurikulum pasti ada pembelajaran dan dalam pembelajaran pasti ada kurikulum. (Wina Sanjaya, 2010:27)

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam implementasi kurikulum. Menurut Fuad Hasan terkait peranan guru terkait implementasi kurikulum adalah sebaik apapun kurikulum jika tidak didukung oleh guru yang berkualitas maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, kurikulum yang kurang baik akan dapat ditopang oleh guru yang berkualitas. Hal senada dipertegas oleh Mulyasa bahwa betapapun bagusnya kurikulum (*official*) tetapi hasilnya akan sangat bergantung oleh apa yang akan dilakukan oleh guru yang berkualitas. Dalam proses pengembangan peran guru dalam kurikulum lebih banyak dalam tataran kelas. Murray Printr dalam Wina Sanjaya (2010:28) mencatat peran guru dalam level ini adalah sebagai *implementer, adapters, developers, dan researchers*.

Pertama, guru berperan sebagai *Implementer*, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun.

Kedua, peran guru sebagai *adapter*, lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum

dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal.

Ketiga, peran guru sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya.

Keempat, sebagai fase terakhir peran guru adalah sebagai peneliti kurikulum (*curriculum researcher*). Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran guru sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektifitas program, menguji strategi pembelajaran, dan lain sebagainya termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum.

#### **d. Upaya Pemerintah dalam Menunjang Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013**

Pemerintah sampai saat ini telah melakukan berbagai upaya guna menunjang pelaksanaan kurikulum 2013 agar dapat

dilaksanakan secara efektif. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah mengadakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan;
2. Pengembangan buku pedoman guru dan buku siswa;
3. Pengembangan manajemen kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah serta;
4. Pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

#### **D. Kurikulum**

Kurikulum (*curriculum*) dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata *curir* yang berarti pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. *Curriculum* diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Hass dan Parkey (1974:3) mengemukakan bahwa “*the curriculum is all of the experinces that individual learns have a program of education whose purpose is to achieve theory and research or past or present professional practice*”. Pernyataan tersebut berarti bahwa kurikulum merupakan pengalaman yang dipelajari oleh individu dalam sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai teori dan praktik penelitian atau masa lalu maupun saat ini. Pengertian kurikulum menurut Wina Sanjaya (2006:2):

Kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu kurikulum dalam sejumlah matapelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar.

Kurikulum sebagai sejumlah matapelajaran dimaksudkan bahwa kurikulum berisi patokan yang harus diikuti dan dicapai oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yaitu siswa mengikuti pembelajaran merupakan tanggung jawab guru atau sekolah ketika di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah berdasarkan kegiatan pendidikan yang diikuti. Kurikulum sebagai perencanaan program belajar yaitu guru yang merencanakan program pembelajaran bertumpu pada kurikulum yang sudah ada dan dikembangkan agar siswa mampu mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.

Pengertian lain dari kurikulum menurut Oemar Hamalik (2008:91)

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai pengalaman tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat penapaian kemampuan siswa, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar siswa dalam satuan pendidikan dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program yang berisikan bahan pembelajaran yang disusun secara sistematis sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pengajar dan siswa peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

## 1. Kurikulum 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81A tentang implementasi Kurikulum 2013 (K-13) menjelaskan, kurikulum yang diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia mulai tahun ajaran 2013/2014 adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 ini dikembangkan dan disempurnakan dengan pola pikir sebagai berikut (Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013):

- 1) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- 2) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-siswa) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-siswa-masyarakat-lingkungan alam, sumber/ media lainnya);
- 3) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (siswa dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh dari internet);
- 4) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif-mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan-sains)
- 5) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- 6) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis multimedia;
- 7) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap siswa;
- 8) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidiscipline*); dan
- 9) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.

Pola pembelajaran kurikulum 2013 dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa pola pembelajaran kurikulum 2013 lebih

menekankan pada keaktifan peserta didik agar potensi dalam dirinya dapat berkembang dengan baik. Guru atau tenaga pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan belajar.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2010:15)

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek,

kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan fenomena sosial tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria perbedaan antara lain fungsi akhir dan pendekatannya.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan objek ketika melakukan penelitian. Pada prinsipnya perumusan fokus adalah untuk membatasi studi bagi peneliti. Selain itu, penetapan fokus penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian antara lain:

1. Implementasi kebijakan kurikulum 2013
  - a. Persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013
    - 1) Sosialisasi Kurikulum 2013
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013
    - 3) Sumber daya yang mencakup Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Anggaran Dana
  - b. Pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013
    - 1) Pelaksanaan Pembelajaran
    - 2) Penerimaan siswa terhadap kurikulum 2013
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan menangkap fenomena riil dari objek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang peneliti ambil adalah Kabupaten Magetan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Magetan memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah dalam bidang pendidikan tingkat menengah pertama jika dilihat dari jumlah unit sekolah dan jumlah murid serta tidak meratanya persebaran siswa tingkat sekolah menengah pertama.

Situs penelitian adalah SMPN 2 Sukomoro, dengan pertimbangan pada awal diterapkannya kurikulum 2013 pada tahun 2014 lalu SMPN 2 Sukomoro tidak termasuk salah satu sekolah yang menjadi sekolah percobaan untuk melaksanakan kurikulum 2013 dan masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum 2013 sendiri tidak berlangsung lama dikarenakan kurikulum 2013 dihentikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Menteri Nomor 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014 karena perlu dikaji ulang. Tetapi pada tahun ajaran baru tahun 2017/2018 SMPN 2 Sukomoro mulai menerapkan kurikulum 2013 setelah kurikulum 2013 kembali di terapkan dan wajib dilaksanakan oleh seluruh sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017. Namun SMPN 2 Sukomoro tidak menerapkan Kurikulum 2013 untuk semua kelas, melainkan

hanya untuk peserta didik kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX tetap menggunakan kurikulum KTSP.

#### D. Sumber Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari beberapa sumber data sehingga diperoleh data yang valid. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang, dokumen-dokumen dan data-data. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari aktivitas wawancara secara langsung kepada informan, sehingga data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro
- b. Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro
- c. Guru SMPN 2 Sukomoro
- d. Peserta Didik SMPN 2 Sukomoro

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi;

- a. Dokumentasi berupa Arsip Gambar SMPN 2 Sukomoro;
- b. Buku Panduan Akademik, Dokumen Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013, dan Petunjuk Teknis Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013;
- c. Surat Edaran Mendikbud Nomor 179432/MPK/KR/2014 tentang pemberhentian pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
- e. SK Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017;
- f. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data bagi keperluan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan kurikulum 2013

##### **1. Wawancara**

Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur dan tatap muka dengan tenaga pendidik/ guru, kepala sekolah, dan peserta didik pada tingkat sekolah menengah pertama kelas VII. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ada. Menurut Suharsimi Arikunto

(2006:227), pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda v (*check*) pada nomor yang sesuai. Pedoman wawancara pada hal ini sama dengan hal tersebut yaitu memberikan tanda pada kolom pencapaian skor yang diperoleh. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data mengenai komponen masukan dan komponen proses serta kendala-kendala yang dihadapi serta ditemui dalam kurikulum 2013.

## 2. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses penelitian dalam melihat situasi dan kondisi penelitian. Teknik penelitian yang seperti ini sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian tindakan di dalam kelas yang terdiri dari pengamatan dari proses pembelajaran, sikap, dan tingkah laku peserta didik, juga interaksi antara peserta didik dengan guru dan interaksi antar peserta didik. Pada penelitian ini dilakukan dengan observasi partisipatif pasif. Dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan guru dan peserta didik yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2010: 312).

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode dimana peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 231). Metode dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa RPP, Silabus, nilai peserta didik, lokasi penelitian, dan proses pengumpulan data.

## F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:148), instrument penelitian adalah sebuah alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian akan sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu penelitian, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. **Peneliti Sendiri** Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah manusia sebagai alat (instrumen) sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alternatif pengumpulan data utama. Ketika melakukan penelitian ini, pertama peneliti melakukan perencanaan dengan menyusun proposal penelitian sekaligus menyusun pedoman wawancara, kedua mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara dengan informan penelitian sekaligus melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data sekunder penelitian, menganalisis dan menafsir data melalui penyusunan skripsi di bagian pembahasan serta melaporkan hasil penelitian.
2. **Pedoman Wawancara** Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan diajukan pada informan/informasi sebagai sumber data dalam penelitian. Setiap informan dalam penelitian ini memiliki rangkain pertanyaan yang berbeda. P
3. **Peralatan Pendukung lain** Peralatan pendukung yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa alat-alat tulis untuk mencatat hal penting saat dilakukan penelitian dan ketika proses wawancara. Kamera untuk

mengambil gambar yang berkaitan dengan penelitian ini dan handphone untuk merekam proses wawancara dengan informan.

### **G. Teknik Analisis Data**

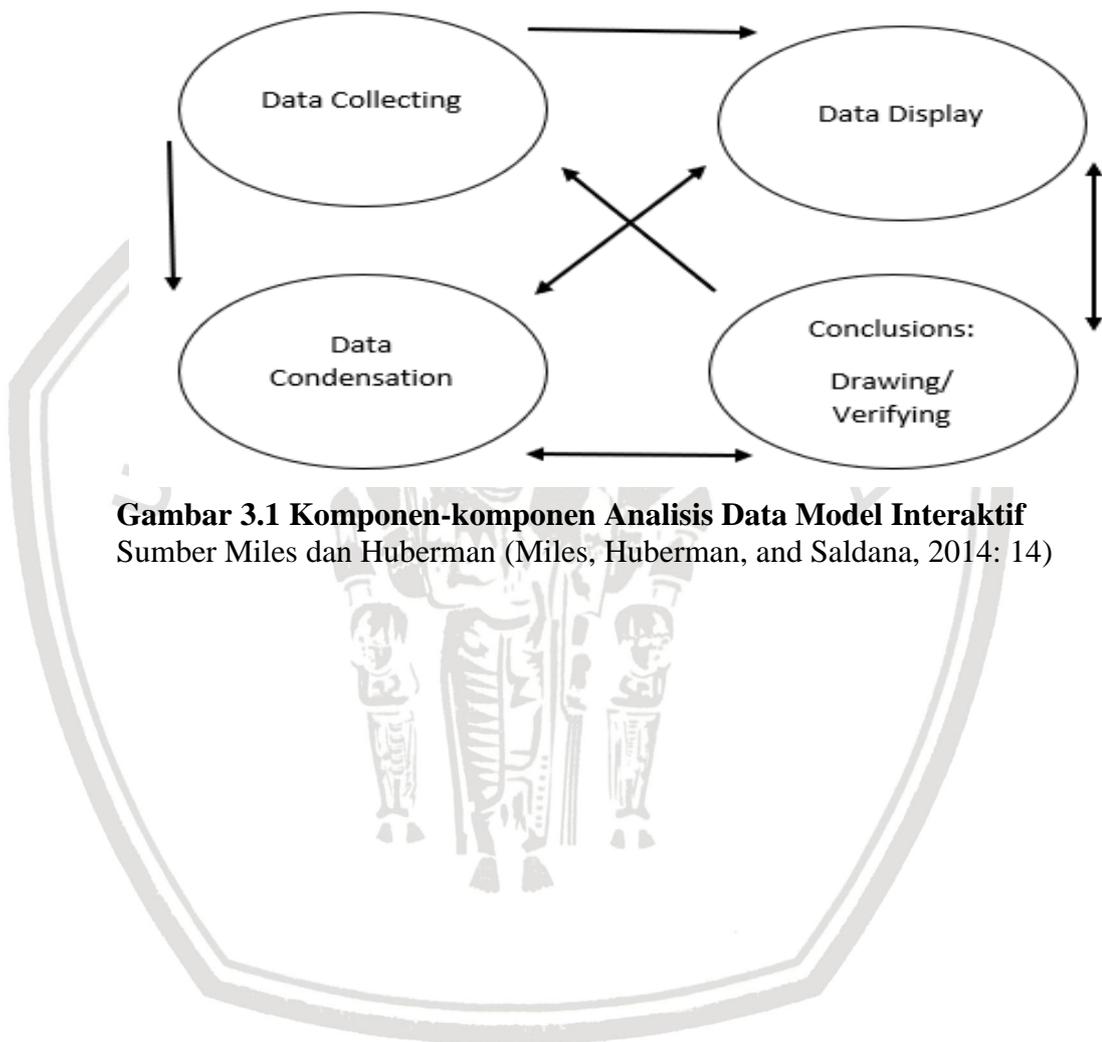
Penelitian kualitatif memerlukan adanya analisis data pada saat peneliti melakukan kegiatan penelitian lapangan guna pengumpulan dan penyusunan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah analisis menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Kondensasi data, yaitu sebagai proses memilih, menyederhanakan, pengabstrakan, dan atau menstransformasikan data yang mendekati dari seluruh bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam proses pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.



**Gambar 3.1** Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
 Sumber Miles dan Huberman (Miles, Huberman, and Saldana, 2014: 14)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

Gambaran umum lokasi dan situs penelitian merupakan penjelasan mengenai kondisi yang ada pada lokasi dan situs penelitian ini. Dimana lokasi Penelitian ini berada di Kabupaten Magetan dan situs penelitian ini berada di SMPN 2 Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan.

Gambaran umum lokasi penelitian menjelaskan tentang kondisi geografis dan iklim, demografis, pembagian wilayah secara administratif, kondisi pendidikan. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan. Gambaran umum situs penelitian di SMPN 2 Sukomoro menjelaskan tentang profil, struktur organisasi, visi misi.

##### a. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur dan berada pada ketinggian antara 60 sampai dengan 1.660 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 688,85 km<sup>2</sup> atau 1,48 persen dari total

wilayah di Jawa Timur. Letak geografis Kabupaten Magetan terletak diantara 7° 38' 30" Lintang Selatan dan 111° 20' 30" Bujur Timur, dengan suhu udara berkisar 16-20° C di daerah pegunungan dan 22-26° C untuk daerah rendah. Batas wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Madiun
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo,  
Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar  
(Jawa Tengah)

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Administasi Kabupaten Magetan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Poncol	51.31
2.	Parang	71.46
3.	Lembeyan	54.85
4.	Takeran	25.46
5.	Kawedanan	39.45
6.	Magetan	23.49
7.	Plaosan	75.54
8.	Panekan	56.29
9.	Sukomoro	33.06
10.	Bendo	42.90
11.	Maospati	25.26
12.	Karangrejo	15.15
13.	Barat	22.71
14.	Kartoharjo	25.03
15.	Karas	35.29
16.	Ngariboyo	39.13
17.	Nguntoronadi	16.72
18.	Sidorejo	35.37
<b>Jumlah</b>		<b>688.85</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2017

Jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan sebanyak 13 kecamatan sebelum pemekaran wilayah. Sejak diadakan otonomi daerah tahun 2001, jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan terus mengalami pemekaran. Sampai tahun 2018 jumlah kecamatan di Kabupaten Magetan sebanyak 18 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 208 desa dan 27 kelurahan, 1.048 Rukun Warga, 4.653 Rukun Tetangga.

#### b. Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Magetan

Pendidikan di Kabupaten Magetan memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pendidikan yang maju kedepannya dengan jumlah lembaga pendidikan yang memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk di Kabupaten Magetan. Berikut tabel jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Magetan tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Magetan.

**Tabel 4.2 Data Lembaga Pendidikan Tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Magetan**

No.	Tingkat	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	SD/ MI	484	13	497
2.	SMP/ MTS	39	16	55
3.	SMA/ MA	10	5	15
4.	SMK	6	30	36
5.	SLB	1	7	8

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Kemendikbud Tahun 2017

Sebagai Kabupaten yang memiliki penduduk sebesar 694.531 jiwa yang terdiri dari 336.215 laki-laki dan 358. 316

perempuan yang tercatat dalam badan pusat statistik tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 81.350 anak yang masuk dalam daftar peserta didik di Kabupaten Magetan tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 4.3 Data Jumlah Peserta Didik Tingkat SD, SMP, dan SMA serta SMK di Kabupaten Magetan**

No.	Tingkat	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	SD/ MI	37.460	4.221	41.681
2.	SMP/ MTS	18.399	796	19.195
3.	SMA/ MA	7.488	346	7.834
4.	SMK	6.722	5.918	12.640

Sumber: Data Pokok Dikdasmen Kemendikbud 2017

Tentu hal tersebut menjadikan Kabupaten Magetan memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi daerah yang lebih maju dengan menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia salah satunya dengan dilakukan melalui sistem pendidikan formal tingkat lanjutan seperti SMP dan MA yang telah terbagi dalam 18 kecamatan dengan 55 lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta.

### c. Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan

#### 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terletak di Jalan Raya Karya Dharma No 178 Kecamatan Magetan. Sesuai dengan Peraturan Bupati No 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan

fungsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dijalankan dengan mengusung visi “Terwujudnya Masyarakat Magetan yang Berimtaq, Berbudi Pekerti Luhur, Cerdas, Terampil, dan Kompetitif”.

Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan tersebut diharapkan dapat dicapai dengan menetapkan beberapa misi antara lain:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan;
- b. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur;
- c. Mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan;
- d. Mewujudkan peningkatan ketrampilan yang mengarah pada kecakapan hidup mewujudkan pendidikan yang berbasis keahlian dan keunggulan serta kompetitif.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan agama di semua jenjang pendidikan;
- b. Meningkatkan pendidikan karakter/ etika, estetika, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur;
- c. Meningkatkan daya serap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
- d. Meningkatkan tingkat ketrampilan yang mengarah pada kecakapan hidup;
- e. Meningkatkan daya saing lulusan guna menyongsong era globalisasi.

## 2) Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Magetan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. Sesuai dengan Peraturan Bupati No 58 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, maka susunan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. Bidang Pendidikan TK/ SD, membawahkan
  - a. Seksi Kurikulum;
  - b. Seksi Sarpras;
  - c. Seksi Pengelolaan Sekolah.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan
  - a. Seksi Pengembangan Pendidikan dan Kesiswaan;
  - b. Seksi Sarpras;
  - c. Seksi Pengelolaan Sekolah.
5. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, membawahkan
  - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Seksi Pendidikan Masyarakat.
6. Bidang Ketenagaan, membawahkan
  - a. Seksi Ketenagaan TK/ SD;
  - b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan PLS;
  - c. Seksi Pengembangan;
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### d. SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan

##### 1) Visi, Misi, dan Tujuan

SMPN 2 Sukomoro terletak di Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Dalam menjalankan fungsinya dalam bidang pendidikan SMPN 2 Sukomoro mempunyai visi “Bersama kita membangun karakter siswa yang berakhlak mulia, santun, dan berbudaya”. Penjabaran visi SMPN 2 Sukomoro adalah sebagai berikut:

##### 1. Berakhlak mulia

- a. Terbentuknya siswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
- b. Terbentuknya siswa yang taat dan rajin beribadah;
- c. Terwujudnya pengamalan nilai-nilai ibadah pada kehidupan sehari-hari.

##### 2. Santun

- a. Terwujudnya siswa yang menghormati dan menghargai orang tua dan guru;
- b. Terwujudnya siswa yang patuh dan taat pada tata tertib sekolah;
- c. Terwujudnya siswa yang rendah hati, jujur, dan dapat dipercaya.

##### 3. Berbudaya

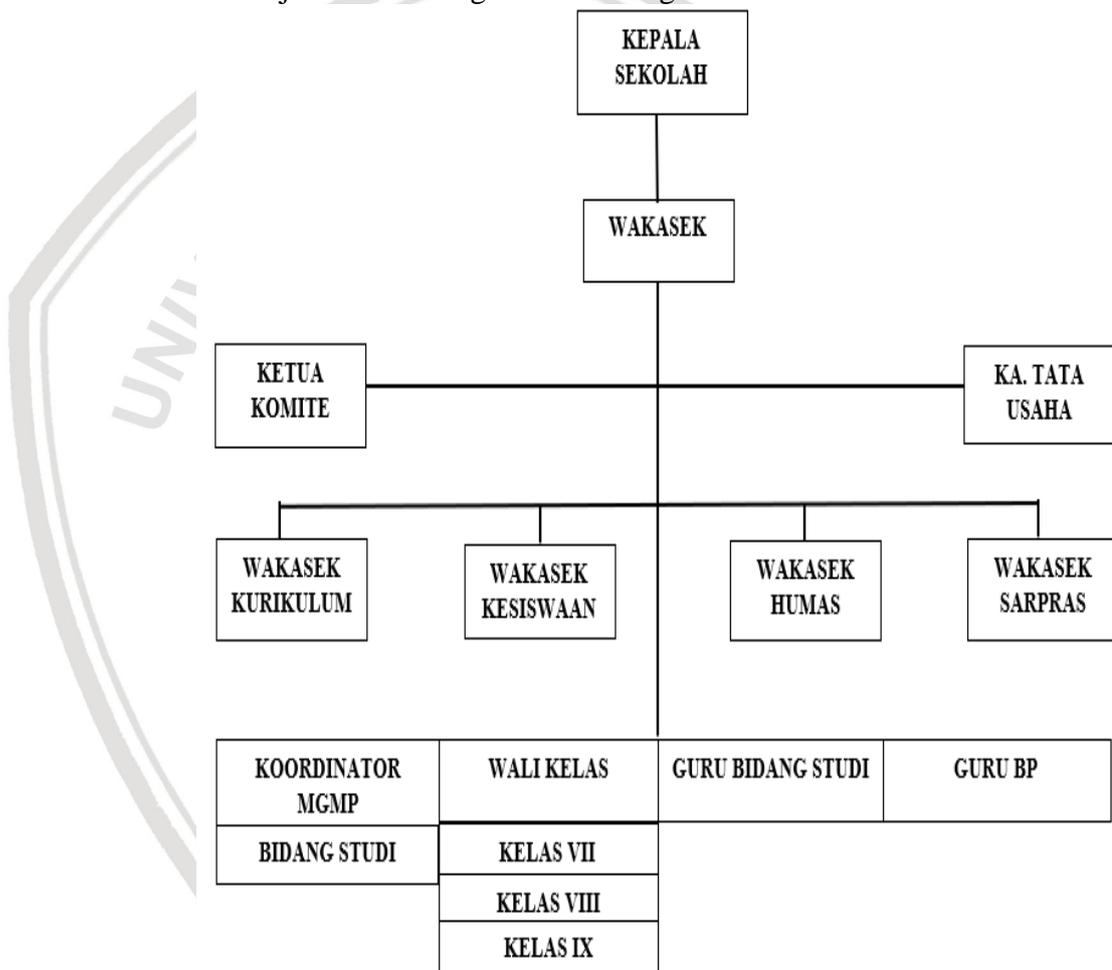
- a. Terwujudnya siswa yang berprestasi dengan perolehan nilai NUN yang tinggi;
- b. Terwujudnya rasa cinta terhadap seni budaya local;
- c. Terwujudnya kelestarian seni budaya lokal;
- d. Terwujudnya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- e. Terwujudnya siswa yang trampil dan cinta lingkungan.

Misi SMPN 2 Sukomoro adalah:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME;
2. Melaksanakan pembiasaan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
3. Melaksanakan pembiasaan senyum, sapa, salam, dan salim;
4. Menanamkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab;
5. Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan siswa;
6. Menumbuhkan semangat untuk meraih prestasi terbaik;
7. Melaksanakan pembiasaan saling menghormati dan menghargai sesama teman;
8. Menanamkan rasa cinta pada kearifan seni budaya lokal;
9. Menanam rasa cinta pada kebersihan, keindahan, dan pelestarian lingkungan.

## 2) Struktur Organisasi

SMPN 2 Sukomoro dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dimana dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kota/ Kabupaten. Adapun gambar struktur organisasi SMPN 2 Sukomoro akan disajikan dalam bagan struktur organisasi dibawah ini:



**Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi SMPN 2 Sukomoro**

Sumber: Arsip SMPN 2 Sukomoro (2017)

SMPN 2 Sukomoro dalam melaksanakan Kurikulum 2013 tentunya harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang

berkompeten. Berikut adalah daftar tabel data guru dan pegawai SMPN 2 Sukomoro:

**Tabel 4.4 Data Pegawai SMPN 2 Sukomoro Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Pegawai**

No.	Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			Jumlah
		PNS	GTT	PTT	
1.	S2	1	-	-	1
2.	S1	24	5	-	29
3.	D3	1	-	-	1
4.	D1	-	-	1	1
5.	SMA	3	-	4	7
6.	SD	1	-	-	1

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

Kelengkapan fasilitas juga merupakan salah satu hal yang mendukung guna berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 2013. Adapun untuk saat ini fasilitas yang dimiliki oleh SMPN 2 Sukomoro yang memiliki luas sekolah 15.890 m<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Daftar Jumlah Fasilitas yang Dimiliki SMPN 2 Sukomoro**

Ruang	Jumlah Ruang
Kelas	9
Kepala Sekolah	1
Guru	1
UKS	1
Administrasi	1
BK	1
Perpustakaan	1
OSIS	1
Laboratorium IPA	1
Laboratorium Komputer	1
Tempat Ibadah	1
Ketrampilan	1
Kamar Mandi	1
Koperasi	1
Aula	1

Ruang	Jumlah Ruang
Gudang	1
Olahraga	1
Ruang multimedia	1

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

SMPN 2 Sukomoro juga dilengkapi dengan lapangan dan area parkir yang disediakan untuk kebutuhan belajar mengajar. Sebagai sekolah yang baru melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 SMPN 2 Sukomoro tentu bukan hanya fasilitas sekolah yang perlu diperhatikan melainkan juga kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat dari siswanya baik bagi tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang terakomodir diluar jam pelajaran di sekolah. Berikut adalah data ekstrakurikuler yang ada di SMPN 2 Sukomoro:

**Tabel 4.6 Daftar Ekstrakurikuler SMPN 2 Sukomoro**

No.	Ekstrakurikuler	Jenis
1.	Pramuka	Wajib
2.	Palang Merah Remaja	Wajib
3.	Drum Band	Pilihan
4.	Karawitan	Pilihan
5.	Futsal	Pilihan
6.	Basket	Pilihan

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai permasalahan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Dimulai dari peneliti melakukan observasi permasalahan yang menjadi kendala di pelaksanaan kurikulum

2013. Dimana pada awal mulanya kebijakan kurikulum 2013 ini di buat pada tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan yang menjabat pada periode 2009-2014, Muhammad Nuh. Setelah berakhirnya masa jabatan Muhammad Nuh dan digantikan oleh Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan kebijakan kurikulum 2013 tetap dijalankan. Pada mulanya kurikulum ini sudah diuji coba pada beberapa sekolah percontohan pada tahun 2013 dan mulai tahun 2014 penerapan kurikulum ini menjadi massif. Kemudian pada tahun 2014 ketika Menteri Pendidikan diganti menjadi Anies Baswedan, kebijakan kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di banyak sekolah dihentikan sementara pada pertengahan tahun ajaran dikarenakan dinilai masih memiliki banyak kekurangan.

Pemberhentian sementara kurikulum 2013 dirasa tidak tepat oleh mantan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh, karena menurutnya jika kembali ke kurikulum sebelumnya yaitu KTSP siswa hanya akan pintar pada bidang akademik dan kurang dalam hal budi pekerti atau etika. Namun pemberhentian sementara kebijakan kurikulum 2013 yang diputuskan oleh Anies Baswedan dimaksudkan agar kebijakan kurikulum 2013 dapat dievaluasi untuk dicari kekurangannya guna diperbaiki lagi. Setelah direvisi dan sempat dihentikan sementara penerapannya, akhirnya kebijakan kurikulum 2013 di terapkan kembali pada tahun ajaran baru 2017/ 2018.

Peneliti memulai penelitian dengan menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kurikulum 2013 seperti Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran implementasi kurikulum 2013.

Adapun beberapa pihak yang bisa dimintai keterangan seputar kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro selaku pemegang kebijakan tertinggi di sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang memegang penuh kurikulum 2013 di sekolah, Asisten bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomoro yang membantu Waka Kurikulum selaku pihak yang memegang penuh kurikulum 2013, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana yang mengetahui kelengkapan sekolah yang dapat mendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013, guru serta peserta didik SMPN 2 Sukomoro sebagai elemen yang harus ada dalam implementasi kurikulum 2013. Penyajian data dan analisis dijadikan satu pembahasan dengan harapan dapat lebih mudah untuk dipahami dan menyimpulkan. Sehingga harapannya laporan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran atau deskripsi mengenai permasalahan di lapangan dengan lebih terarah dan efisien.

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian akan disajikan dengan melihat kerangka konseptual yang telah ditentukan sebelumnya dan data-data yang telah diperoleh dari wawancara langsung kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro, Waka Sarana Prasarana SMPN 2 Sukomoro, Asisten Kurikulum SMPN 2 Sukomoro, guru serta peserta didik SMPN 2 Sukomoro. Pada implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama (studi pada SMPN 2 Sukomoro). Pada bagian awal penyajian data akan membahas mengenai gambaran implementasi kebijakan kurikulum 2013 secara umum,

dan kedua mengenai pendiskripsian yang menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 dari tahapan implementasi menurut Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang berupa tahap interpretasi, tahap organisasi dan tahap aplikasi.

### **1. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan**

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, pada hakikatnya adalah bentuk pembaharuan kebijakan dalam bidang kebijakan pendidikan di Indonesia dimana dalam implementasinya tidak hanya penghimpunan tetapi juga mengelola sumber daya manusia sebagai aksi dari suatu kebijakan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kurikulum 2013 adalah bentuk dari penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berikut adalah penjelasan dari petikan wawancara:

“...kurikulum 2013 itu sebenarnya bukan kurikulum baru yang tiba-tiba ada dan dijalankan, tapi itu ya dari pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Jadi KTSP dianggap masih memiliki beberapa kekurangan sehingga dievaluasi dan disempurnakan menjadi kurikulum 2013. Dinamakan kurikulum 2013 karena kebetulan dibuatnya tahun 2013. untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada waka kurikulum dan asisten kurikulum SMPN 2 Sukomoro...” (wawancara Ibu Sri Hari Suryanti, Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Waka Kurikulum SMPN 2

Sukomoro

“...kurikulum 2013 itu perubahan dari KTSP yang sesuai dengan peraturan Menteri pendidikan kita yang sekarang. Bedanya kurikulum 2013 sama KTSP itu cuma di jam mengajarnya saja, kalau KTSP bisa ditambah sesuai kebutuhan tapi kalau kurikulum 2013 hanya beberapa mata pelajaran saja yang bisa ditambah. Kurikulum 2013 ini juga ada SOP nya dibuat oleh waka dari empat bidang yaitu kurikulum, humas, satpras, dan kesiswaan dan ada juga buku pedomannya yang dijadikan landasan kurikulum 2013 ...” (wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro tanggal 26 Maret 2018).

Penyempurnaan KTSP ke Kurikulum 2013 lebih menekankan pada karakter dari siswa, seperti yang diutarakan oleh Ibu Anik berikut ini:

“...Kurikulum 2013 ini itu lebih membuat siswa aktif jadi tidak hanya diam dan mendengarkan penjelasan dari guru. Melainkan siswa juga harus berusaha sendiri untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Nah hal seperti ini yang menjadikan siswa tidak hanya sebagai objek tetapi subyek disebutnya metode *scientific*. Dimana nanti dalam proses belajar mengajar siswa itu mengamati sebuah permasalahan, dari mengamati akan muncul pertanyaan, dari pertanyaan yang muncul ini siswa harus mampu mencari jawaban sebanyak-banyaknya, kemudian akan dikomunikasikan kepada guru dan seluruh teman di kelas biasanya disebut metode 5M...” (wawancara Ibu ANik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Dimana kurikulum 2013 menggunakan metode pendekatan *scientific* yaitu dengan metode 5M mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Dalam metode pembelajaran kurikulum 2013 peserta didik tidak hanya diam mendengarkan penjelasan dari guru tetapi siswa juga harus sudah siap dengan materi yang akan

disampaikan oleh guru jadi akan ada interaksi timbal balik ketika guru menerangkan dan siswa harus bisa menanggapi. Metode ini dipilih dengan tujuan peserta didik dapat membangun karakternya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebelum implementasi kebijakan kurikulum 2013 dilaksanakan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu yaitu persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 dan pelaksanaan kurikulum 2013 itu sendiri.

#### **a. Persiapan Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013**

Persiapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dilakukan dalam beberapa agenda yaitu persiapan diawali dengan sosialisasi kurikulum 2013, pelatihan dan pendidikan kurikulum 2013, serta persiapan sumber daya yang mendukung kurikulum 2013 yang meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sarana Prasarana, Sumber Daya Dana.

##### **1) Sosialisasi Kurikulum 2013**

Sosialisasi kurikulum pada hakekatnya merupakan proses pembelajaran kepada tenaga pengajar untuk mempelajari kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum yang diharapkan dalam implementasinya dapat dijalankan dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Berikut adalah petikan hasil wawancara mengenai sosialisasi implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang diperoleh dilapangan sebagai berikut:

“...oh kalau untuk masalah sosialisasi mengenai kurikulum 2013 ini memang sudah dilakukan oleh Dispora Kabupaten Magetan, tapi dari pihak Dispora tidak secara khusus datang ke tiap-tiap sekolah untuk melakukan sosialisasi melainkan mengundang perwakilan tiap-tiap sekolah dimana diwakili oleh bagian kurikulum untuk mengikuti sosialisasi ini...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro yang membenarkan bahwa sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing sekolah sebagai berikut:

“...sebelum kurikulum 2013 diterapkan di SMPN 2 Sukomoro terlebih dahulu bagian kurikulum dipanggil oleh Dispora kemudian diberikan undangan untuk mengikuti sosialisasi mengenai pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru akan melaksanakan kurikulum 2013, karena sebelumnya hanya ada 3 SMP yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan. Sosialisasi dilakukan secara *classical* jadi semua SMP di Kabupaten Magetan yang akan menjalankan kurikulum 2013 dikumpulkan kemudian diberi pengarahan secara bersama-sama. Sosialisasinya ini sendiri hanya 1 hari saja dan dari masing-masing sekolah hanya diwakilkan oleh bagian kurikulumnya saja...” (wawancara Ibu MK. Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Pendapat lain juga ditambahkan oleh rekan guru kelas VII yang juga tidak mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh

Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“...kalau untuk guru memang tidak ada sosialisasi langsung dari pihak Dispora, jadi penjelasan terkait pelaksanaan kurikulum 2013 disampaikan oleh bagian kurikulum dari masing-masing sekolah yang sudah mengikuti sosialisasi secara *classical* yang dilakukan oleh Dispora. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh bagian kurikulum memang kurang jelas, mungkin karena singkatnya waktu sosialisasi yang dilakukan oleh Dispora sehingga pemahaman dari bagian kurikulum perwakilan dari tiap-tiap sekolah juga kurang jelas...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Magetan bisa dikatakan belum efektif karena guru sebagai tenaga pendidik tidak dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan kurikulum 2013 dan hanya mengundang bagian kurikulum dari sekolah saja dalam sosialisasinya. Sementara dalam pelaksanaannya nanti guru juga memiliki peran penting dalam kebijakan kurikulum 2013 sebagai penyampai materi kepada peserta didik. Sosialisasi kurikulum 2013 juga terkesan tergesa-gesa karena hanya dilakukan selama satu hari saja. Sehingga bagian kurikulum dari SMP yang bersangkutan belum paham betul apa, bagaimana, dan seperti apa sebenarnya Kurikulum 2013 dan setelah itu bagian kurikulum juga harus mampu menerangkan atau menjelaskan hasil dari sosialisasi kepada seluruh pegawai yang ada disekolah. Sebenarnya proses komunikasi

dalam sosialisasi ini sudah benar dengan cara Dinas Pendidikan mengundang perwakilan sekolah untuk hadir dalam sosialisasi kebijakan kurikulum 2013, kemudian bagian kurikulum menyampaikan hasil sosialisasi kepada pihak sekolah hanya saja penyampiannya kurang jelas dan tergesa-gesa.

## 2) Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang dilaksanakan serentak di seluruh sekolah yang bukan merupakan *pilot project* mengharuskan Dinas Pendidikan melakukan pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013 kepada guru-guru dari sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan Kurikulum 2013. Pendidikan dan pelatihan ini dijalankan dengan tujuan agar kebijakan kurikulum 2013 bisa berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan kepada tenaga pengajar dari SMPN 2 Sukomoro adalah sebagai berikut

“...pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menurut saya merupakan langkah yang sudah tepat, karena sekolah kami baru akan melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini jadi masih belum paham benar tentang kurikulum 2013 ini. Tapi meskipun sudah diadakan

pelatihan dan pendidikan kami masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum 2013 ini dikarenakan singkatnya waktu pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro yang mengatakan hal sebagai berikut:

“...menindaklanjuti sosialisasi dari Dispora yang hanya mengundang bidang kurikulum dari masing-masing sekolah, maka Dispora mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi para guru guna bisa melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 dengan baik. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan ini akan dibagi per bidang studi, misal guru matematika nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan para guru matematika juga jadi tidak seluruh guru mata pelajaran yang berbeda dijadikan satu...” (Wawancara Ibu MK. Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Serupa dengan pernyataan diatas, guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro Ibu Anik Nurhayati juga mengatakan hal sebagai berikut:

“...menurut saya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan yang kami para guru butuhkan untuk melakukan proses belajar mengajar dengan peserta didik di kelas dengan kurikulum yang baru. Namun menurut kami pendidikan dan pelatihan yang diberikan terlalu singkat, karena semua materi yang berkaitan dengan kurikulum 2013 hanya disampaikan dan dijelaskan dalam waktu satu minggu dan hanya memaparkan kurikulum 2013 secara umum saja. Hal ini membuat kami sulit untuk mengembangkan kurikulum 2013 karena kurang paham betul bagaimana sebenarnya kurikulum 2013 itu sendiri...” (wawancara dengan Ibu

Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dalam rangka pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah awal dalam menghadapi implementasi kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan tidak seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh para tenaga pendidik yang nantinya akan melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini dalam kegiatan belajar mengajar. Bagi guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ini merasa bahwa pendidikan dan pelatihan ini berjalan kurang baik dengan berbagai alasan diantaranya alokasi waktu pendidikan dan pelatihan yang terlalu singkat yaitu hanya satu minggu, pendidikan dan pelatihan hanya berfokus pada pengetahuan umum seputar kurikulum 2013. Akibatnya banyak guru yang merasa kesulitan dalam menerapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar. Namun dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini cukup memberikan gambaran awal bagi guru untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya guru diharapkan dapat memahami kurikulum 2013 seiring dengan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 November 2017 bertempat di SMPN 1 Sidorejo



**Gambar 4.2 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kurikulum 2013**

Sumber: Arsip SMPN 2 Sukomoro (2017)

### 3) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu variabel penting dalam implemenatsi kebijakan kurikulum 2013. Walaupun kebijakan kurikulum 2013 telah di sosialisasikan dan diberikan pendidikan serta pelatihan namun sumber daya tetap menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan

kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan jika sumber daya yang dibutuhkan mengalami kekurangan maka pelaksanaan kurikulum 2013 akan berjalan tidak efektif. Sumber daya dalam implementasi kurikulum 2013 ini meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dana. Sumber daya manusia merupakan implementor dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Sumber daya sarana prasarana merupakan fasilitas yang terkait dengan fasilitas fisik yang harus tersedia dan dimiliki oleh sekolah guna mendukung implementasi kurikulum 2013. Sumber daya dana terkait dengan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013. Sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum 2013 dapat dijelaskan melalui petikan wawancara berikut.

“...kurikulum 2013 ini untuk sekolah sekolah *nonpilot project* menurut saya dilaksanakan terlalu tergesa-gesa ya, jadi seharusnya kemarin itu guru mendapat sosialisasi langsung dari dinas terkait namun ternyata hanya bagian kurikulum saja. Jadi ya SDM nya belum siap betul, waktu diklat nya juga terlalu singkat hanya satu minggu...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Pendapat lain diutarakan oleh guru kelas VII yang menurut beliau guru dituntut untuk selalu siap dalam menjalankan tugasnya, hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi seperti berikut:

“...guru-guru tentunya siap tidak siap harus siap ya, kan kemarin itu sebelum dilaksanakan kurikulum 2013 sudah ada sosialisasi dan juga diklat dari Dinas Pendidikan apalagi kan Pegawai Negeri Sipil memang harus siap melaksanakan tugas. Tetapi mungkin memang masih kurang paham betul tentang kurikulum 2013 karena waktunya mepet antara sosialisasi, diklat, dan pelaksanaannya...” (Wawancara Ibu MK. Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Menurut guru kelas VII lainnya, menambahkan bahwa guru masih merasa kesulitan dengan perubahan pelaksanaan kurikulum seperti berikut:

“...kalau untuk guru sendiri merasa kesulitan dalam melaksanakan kurikulum 2013 karena prosedur penilaian untuk siswa terlalu rumit. Belum lagi kan kurikulum 2013 ini kebanyakan menggunakan teknologi komputer, nah masih banyak guru-guru di sini yang belum terlalu lancar mengoperasikan perangkat komputer jadi memang itu kendalanya...” (wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Dari petikan wawancara mengenai sumber daya manusia diatas dapat diketahui jika hingga saat ini kendala-kendala yang dialami oleh sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 adalah sumber daya manusianya. Banyak guru yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer dan para guru masih terbiasa menggunakan model belajar mengajar dengan kurikulum lama. Dimana guru lebih terbiasa mengajar dengan menggunakan metode ceramah, sementara pada kurikulum 2013 ini guru dituntut hanya sebagai fasilitator berjalan kurang baik. Meskipun dalam

diklat yang telah diikuti juga sudah terdapat pelajaran mengenai *peer teaching* yang dikondisikan mirip dengan kondisi kelas. Selain itu pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 yang dapat dikatakan tergesa-gesa mengharuskan guru memahami sendiri mengenai pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013.

Lebih lanjut mengenai kualitas sumber daya manusia di SMPN 2 Sukomoro, berikut tabel berdasarkan jabatan dan jumlah tenaga pengajar di SMPN 2 Sukomoro

**Tabel 4.7 SDM SMPN 2 Sukomoro Berdasarkan Jabatan dan Jumlah**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Sekolah	1
2.	PNS Guru	28
3.	Guru Tidak Tetap	5
4.	Tenaga Tata Usaha	3
5.	Pegawai Tidak Tetap	3
<b>Jumlah Total</b>		<b>40</b>

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

Berdasarkan data diatas sebenarnya jumlah sumber daya manusia di SMPN 2 Sukomoro sudah mencukupi untuk implementasi kebijakan kurikulum 2013. Namun dikarenakan adanya kebijakan sertifikasi guru dan beberapa persyaratannya ada beberapa guru yang diharuskan untuk memberikan jam tambahan dikarenakan dalam sertifikasi guru harus mengajar sebanyak 24 jam per minggu. Guna memperoleh sumber daya manusia yang handal dan mampu

menjalankan kebijakan kurikulum 2013 ini dengan baik perlu adanya pengembangan sumber daya manusia.

Sumber daya lain yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 adalah sumber daya sarana prasarana. Sumber daya sarana prasarana merupakan sumber daya fisik berupa fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun ketersediaan dan kelengkapan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat diketahui dari petikan wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut

“...ya yang paling penting itu buku kurikulum 2013 nya itu sendiri, karena kalau tidak ada buku paketnya itu pembeajarannya tidak bisa berjalan soalnya kan kurikulum 2013 ini modelnya tematik jadi semua pelajaran ada di buku paketnya itu jadi satu. Kalau untuk fasilitas yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga memang sudah ada dari dulu dan bisa digunakan untuk menunjang kurikulum 2013 ini...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Ibu Dewi sebagai guru yang mengajar dengan kurikulum 2013 seperti berikut:

“...yang pertama harus ada itu buku paket kurikulum 2013 untuk siswa, nah nanti untuk guru bisa beli sendiri buku penunjangnya. Yang harus ada juga itu laptop sama LCD soalnya kurikulum 2013 ini modelnya pembelajaran aplikasi jadi semuanya *online*...”

(Wawancara Ibu MK. Dewi Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMPN 2 Sukomoro dalam pelaksanaan kurikulum 2013 disampaikan oleh Ibu Anik seperti berikut:

“...kalau untuk guru sendiri ya harus punya buku penunjang kurikulum 2013, selain itu guru biasanya membawa laptop sendiri untuk proses pembelajaran kurikulum 2013 karena terbatasnya laptop yang dimiliki sekolah...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Pernyataan serupa yang memebankan adanya kekurangan dalam sarana dan prasarana juga disampaikan oleh Waka Sarana dan Prasarana SMPN 2 Sukomoro seperti berikut:

“... pelaksanaan kurikulum 2013 perlu media mbak, media yang saat ini digunakan itu laptop dan LCD. Seharusnya setiap kelas yang melaksanakan kurikulum 2013 ini sudah harus ada laptop dan LCD. Tapi di SMPN 2 Sukomoro ini LCD nya hanya ada satu itupun adanya di ruang multimedia bukan dikelas. Jadi penggunaan LCD harus bergantian, ini yang membuat pelaksanaan kurikulum 2013 berjalan kurang efektif disini...” (Wawancara Bapak Sudiro, Waka Sarana dan Prasarana SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Mengenai sumber daya fasilitas dari pelaksana kebijakan kurikulum 2013 yaitu SMPN 2 Sukomoro dapat dilihat berdasarkan tabel Tabel 4.2 Daftar Jumlah Fasilitas yang dimiliki SMPN 2 Sukomoro yang telah dicantumkan dalam gambaran umum.

Berdasarkan petikan wawancara dan data tabel diatas dapat dikatakan SMPN 2 Sukomoro telah memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang implementasi kebijakan kurikulum 2013. Namun untuk jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang, dimana dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 ada dua kelas VII yang melaksanakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro, dalam pengamatan yang dilakukan peneliti itu berdasarkan di ruang kelas VII yang melaksanakan kurikulum 2013 belum ada LCD yang terpasang paten didalam kelas. Hal ini disebabkan karena LCD yang dimiliki SMPN 2 Sukomoro hanya berjumlah satu buah dan disimpan di ruang multimedia sehingga menghambat berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar dan kurang efektifnya implementasi kurikulum 2013 karena harus bergantian dalam menggunakan LCD.

Impelemntasi kebijakan kurikulum 2013 perlu ditunjang dengan sumber dana yang mencukupi. Sumber dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran ataupun kegiatan pengadaan sarana prasarana penunjang pembelajaran dalam kurikulum 2013. Mengenai sumber dana dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro, sebagaimana hasil wawancara berikut.

“...dana untuk kurikulum 2013 ini ya dapatnya dari pemerintah atau biasanya disebut dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS itu mbak. Jadi kan itu dapat rutin dari pemerintah nah itu nanti dikelola untuk kurikulum 2013 juga. Sebenarnya kita ada 3 sumber dana untuk implemntasi kurikulum 2013 ini yang pertama ya dari pemerintah atau BOS itu. Yang kedua dari *sharing* komite atau dari wali murid. Dan yang ketiga itu sumbangan sukarela dari guru untuk beli alat kelengkapan kurikulum 2013...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Sumber dana Kurikulum 2013 yang berasal dari tiga sumber diatas juga dibenarkan oleh guru kelas VII Ibu Dewi seperti berikut:

“...kalau masalah dana kan sudah ada dari pemerintah berupa dana BOS. Kemudian biasanya ada dana insidental dari wali murid. Nanti untuk kelengkapan lain biasanya guru-guru juga iuran...” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Hal senada juga diungkapkan oleh guru kelas VII lainnya yaitu Ibu Anik seperti berikut:

“...untuk masalah dana sendiri sudah didapat kan rutin dari pemerintah berupa BOS. Cuman nanti ada alokasi per pos untuk dana BOS ini jadi tidak semuanya digunakan untuk kurikulum 2013. Guru juga iuran untuk menambah kelengkapan implementasi kebijakan kurikulum 2013 ini...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SMPN 2 Sukomoro dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 memiliki dana yang cukup. Dana yang diperoleh dalam impelmentasi kurikulum 2013 selain didapat

dari pemerintah juga diberi bantuan dari wali murid dan juga iuran sukarela dari guru. Dana yang didapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah. Selain itu sumber dana juga digunakan untuk pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

#### **b. Pelaksanaan Kebijakan Kurikulum 2013**

Kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat dilihat bagaimana pelaksanaannya apakah dapat diterima atau tidak melalui 2 hal yaitu dari pelaksanaan pembelajaran dan penerimaan siswa terhadap kebijakan kurikulum 2013 ini.

##### **1) Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 berorientasi kepada tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, ketrampilan, dan pengetahuan disamping cara belajar yang menyenangkan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 memosisikan guru sebagai fasilitator atau mediator yang menjadi perantara antara sumber belajar dengan peserta didik. Pencapaian kompetensi merupakan tujuan dari pembelajaran kurikulum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran guna

mencapai kompetensi siswa. Hal tersebut antara lain metode yang digunakan dalam pembelajaran dan aspek penilaian.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat diketahui melalui petikan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro

“...metode pembelajaran yang digunakan dalam implementasi kurikulum 2013 itu *scientific*. *Scientific* sendiri maksudnya itu siswa harus aktif dan harus paham pelajaran yang akan diterangkan oleh guru jadi sebelum pelajaran dimulai siswa sudah harus mencari tahu apa, bagaimana, dan seperti apa pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Ada pula nanti pembelajaran di luar kelas karena tidak hanya harus cerdas tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk mempersiapkan siswa agar mampu terjun secara langsung ke masyarakat...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Metode *scientific* merupakan metode utama yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi seperti berikut:

“...metode pembelajaran yang dikehendaki dalam kurikulum 2013 itu ya berpusat pada peserta didik. Kalo sekarang disebutnya *scientific* dengan sifat pembelajarannya yang kontekstual yang semula itu cuma eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi kini dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta...” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Pernyataan Ibu Dewi juga didukung oleh pernyataan serupa dari Ibu Anik seperti berikut:

“...sebelum kita menerapkan kurikulum 2013 kita kan pakainya KTSP, nah KTSP ini gurunya yang menerangkan semacam ceramah. Beda dengan kurikulum 2013 dimana gurunya hanya sebagai moderator atau mediator saja dikelas. Proses pembelajarannya sendiri pakai model *scientific* yang pakai 5M jadi anak-anak lebih aktif dan terampil. Selain siswa guru nugaharus mampu menyampaikan maksud kurikulum 2013 dengan baik kepada siswa agar mudah dipahami...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Penerapan metode *scientific* harus didukung dengan sarana dan prasarana IT yang memadai karena metode *scientific* berkaitan dengan teknologi seperti yang diutarakan Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro seperti berikut:

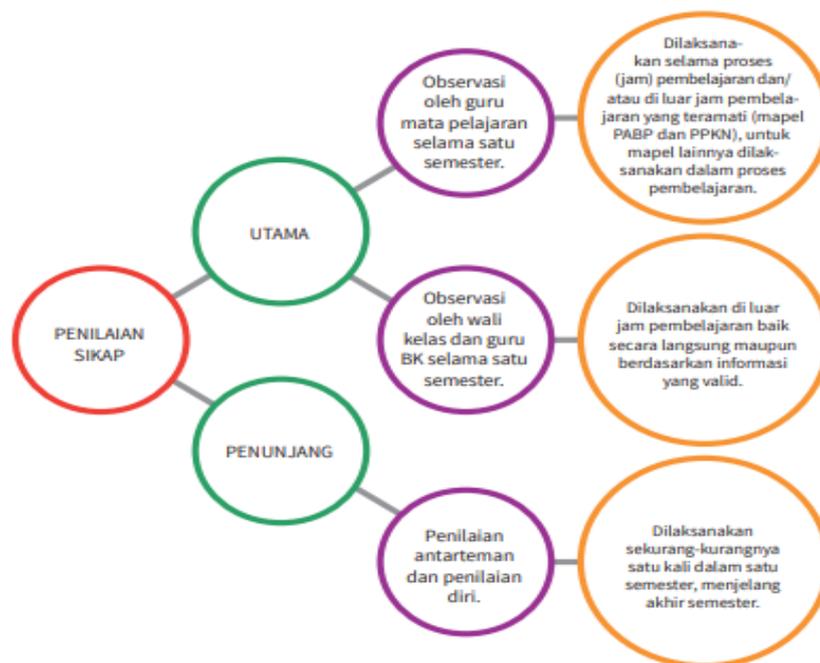
“...kurikulum 2013 dalam proses pembelajarannya yang menggunakan metode *scientific* ini tidak lepas dari teknologi informasi ya. Jadi setiap data pembelajarannya itu diambil dengan bantuan sarana prasarana IT...” (Wawancara Bapak Sudiro, Waka Sarana Prasarana SMPN 2 Sukomoro pada Tanggal 28 Maret 2018)

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *scientific* yang mengikutsertakan peran aktif dari peserta didik dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan selama proses belajar mengajar merupakan bagian dari metode pembelajaran

*scientific*. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang aktif bagi siswa agar proses pembelajaran tidak menjenuhkan. Guru juga harus mampu memaksimalkan sarana prasarana yang mendukung implementasi kurikulum 2013 ini seperti perangkat IT. Pembelajaran diluar kelas juga diperlukan guna mencapai tujuan dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 dimana siswa harus mampu bersosialisasi dan terjun langsung ditengah-tengah masyarakat.

Aspek penilaian yang juga menjadi bagian dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 dimana penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan hasil belajar siswa. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil ukuran pencapaian hasil kompetensi siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Penilaian dalam kurikulum 2013 yang diperdalam adalah penilaian prestasi siswa terutama penilaian sikap. Adapun penilaian sikap dalam kurikulum 2013 dapat dilihat dalam gambar berikut dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 4.3 Skema Penilaian Sikap Kurikulum 2013**

Sumber: Kemendikbud, Panduan Penilaian SMP (2017)

Proses penilaian yang digunakan dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat diketahui melalui petikan wawancara sebagai berikut

“...guru-guru nampaknya masih mengalami kesulitan dalam penilaian pada kurikulum 2013, kalau di kurikulum 2013 guru harus bisa observasi dan tidak semua guru bisa melakukan observasi tersebut. Penilaian dalam kurikulum 2013 ini meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Penilaian dalam kurikulum 2013 lebih rumit dari kurikulum sebelumnya, kalau sebelumnya kan nilai siswa dibandingkan dengan siswa lain jadi ada peringkat dalam kelas, kalau untuk kurikulum 2013 ini tidak seperti itu, nilai atau capaian siswa dibandingkan dengan kriteria kompetensi yang telah ditetapkan. (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Prosedur penilaian kurikulum 2013 yang dirasa sulit juga diutarakan oleh Ibu Dewi seperti berikut:

“...penilaian dalam implementasi kurikulum 2013 ini menggunakan acuan kriteria, dimana penilaian ini

dilakukan dengan membandingkan capaian siswa dengan kriteria kompetensi yang ditetapkan. Tentu berbeda dengan penilaian kurikulum KTSP jadinya sebagian guru masih merasa bingung dan kesulitan dalam melakukan penilaian kurikulum 2013 ini, ditambah lagi menurut kami sosialisai serta diklat dan pendidikan yang dilakukan dinas terkait masih kurang...” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Hal serupa juga dirasakan oleh guru lain dalam pemberian penilain terhadap siswa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anik seperti berikut:

“...kalau untuk penilaian sendiri, kami sebagai guru tentu merasa sedikit kesulitan karena kan ada tiga aspek yang harus dinilai yaitu sikapnya, pengetahuannya, dan ketrampilan dari siswa jadi penilaiannya itu lebih banyak kriterianya. Dan setiap aspek penilaian punya format penilaian yang berbeda-beda. Seperti misal penilaian sikap itu nanti harus dijelaskan secara deskriptif jadi kita sebagai guru harus benar-benar paham karakter siswa satu per satu tapi kadang juga banyak siswa yang kalau ditanya jawabnya tidak jujur itu juga bisa membuat guru memberikan penilaian yang salah terhadap siswa...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tergambar jelas bahwa aspek penilaian menjadi kesulitan bagi guru dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013. Alasan utama hal ini bisa terjadi karena kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga guru-guru belum paham betul bagaimana penilaian kurikulum 2013 yang benar, ditambah lagi banyaknya aspek penilaian dalam kurikulum 2013 dimana dalam tiap aspek penilaian

mempunyai format penilaian yang berbeda. Seperti dalam penilaian sikap guru harus melakukan observasi dalam kegiatan siswa sehari-hari disekolah. Penilaian pengetahuan guru memberikan tes tulis, tes lisan, dan tugas portofolio. Dan untuk penilaian ketrampilan guru harus menugaskan siswa untuk menghasilkan suatu produk dari materi yang telah disampaikan.

## 2) **Penerimaan Siswa Terhadap Kurikulum 2013**

Kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi cerdas, kuat, dan dapat bersaing. Tapi pada kenyataannya tidak semua siswa dapat mengikuti metode pembelajaran yang ada pada kurikulum 2013 dan justru menyulitkan siswa dalam memahami inti dari pelajaran yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara berikut

“...Kalau untuk peserta didiknya sendiri itu kan memang sudah ketentuan dari sana untuk pelaksanaan kurikulum 2013 jadi mau tidak mau juga harus mengikuti kurikulum yang ada. Tapi memang keadaannya para siswa kesulitan mengikuti kurikulum 2013 karena memang dari input siswa di SMPN 2 Sukomoro ini hanya dari warga sekitar yang kemampuannya dibawah rata-rata. Siswa yang diatas rata-rata mungkin hanya 1-2 anak saja berbeda dengan SMP-SMP favorit. Kalau bisa diterapkan dengan benar kurikulum ini sebenarnya lebih membuat siswa memiliki pengetahuan lebih karena siswa harus bisa memecahkan masalah sendiri tanpa bergantung kepada guru...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka

Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Penerimaan siswa terhadap metode pembelajaran kurikulum 2013 juga disampaikan oleh Ibu Anik seperti berikut:

“...siswa disini kan bisa tidak bisa memang harus melaksanakan kurikulum 2013 karena sudah ketentuannya seperti itu. Memang tidak semuanya bisa mengikuti kurikulum 2013 ini, kan kalau di kurikulum 2013 ini siswa nya yang harus aktif sedangkan gurunya hanya sebagai motivator saja. Masih banyak siswa yang pasif dalam pelajaran tidak semuanya mau aktif jadinya guru juga sulit untuk mengajar metode mengajarnya pakai buku paket tematik jadi pembahasan untuk tiap pembelajaran kurang mendalam, siswa jadi sulit untuk memahami suatu pelajaran. Tapi kurikulum ini sebenarnya bagus untuk melatih kemandirian dan ketrampilan siswa karena model nya *student centries...*” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Dilihat dari sudut pandang siswa dalam menerima kurikulum 2013 adalah adanya perbedaan dari kurikulum yang mereka pakai sebelumnya di Sekolah Dasar dimana masih menggunakan KTSP, seperti yang disampaikan siswa seperti berikut:

“...saat pertama kali belajar dengan kurikulum yang baru saya kaget karena berbeda sekali dengan di sekolah dasar (SD). Pas saya di SD buku paket untuk tiap pelajaran itu beda-beda kalau pas di SMP buku pakatnya cuma satu. Lalu tugasnya jadi lebih banyak, setiap selesai materi kita disuruh buat produk yang nantinya di pajang dikelas...” (Wawancara dengan Agus Supriyadi, Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Beban tugas yang lebih banyak dalam kurikulum 2013 juga diutarakan oleh siswa lainnya seperti pada petikan wawancara berikut:

“...tugasnya banyak, lalu guru hanya menerangkan sedikit saja waktu pelajaran sisanya kita disuruh belajar sendiri. Baru nanti kalau ada yang salah guru membenarkan. Muridnya juga disuruh aktif dikelas jadi harus banyak bertanya kepada guru...” (Wawancara Hanna Dwi Aprilianti, Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Tidak semua siswa merasa kesulitan mengikuti pembelajaran dengan kurikulum 2013 ada juga siswa yang merasa senang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum 2013 seperti yang disampaikan siswa berikut ini:

“...belajar dengan kurikulum ini sebenarnya ada senang dan tidaknya, senangnya kalau ngajar sudah pake LCD, tidak senangnya kada kurang paham sama materi yang diajarkan guru. Tapi tidak bisa sering-sering pakai LCD karena harus gantian sama kelas VII-A...” (Wawancara dengan Aditya Hasan Rifai, Siswa Kelas VII-B pada tanggal 28 Maret 2018)

Hal senada juga disampaikan siswa lainnya, dimana siswa merasa lebih senang menggunakan kurikulum 2013 karena siswa bisa menjadi lebih aktif dan lebih percaya diri, hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

“...senang belajar dengan kurikulum yang baru ini karena kita sebagai siswa diberi kebebasan untuk lebih aktif dan mengutarakan pendapat kita. Bisa melatih kepercayaan diri juga karena sering disuruh presentasi didepan kelas...” (Wawancara dengan Safira Ayu Maharani, Siswa Kelas VII-B SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa peserta didik siap tidak siap harus mengikuti implementasi kebijakan kurikulum 2013 karena sudah diwajibkan oleh pemerintah. Siswa sudah bisa mengikuti proses belajar mengajar dalam kurikulum 2013 hanya saja belum bisa mengikuti kurikulum 2013 secara maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti mereka belum paham benar dengan cara belajar menggunakan kurikulum 2013, dimana siswa tidak dilibatkan dalam sosialisasi kurikulum 2013 dan langsung melaksanakannya sehingga mereka kurang memahami kurikulum 2013 dan terbatasnya sarana prasarana yang dapat menunjang implementasi kebijakan kurikulum 2013.

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 ini dianggap bisa menjadikan siswa lebih mandiri dan lebih kreatif lagi dengan metode belajar yang diterapkan dalam kurikulum 2013 karena lebih mengutamakan keaktifan siswa. Kurikulum ini dianggap lebih bagus dari kurikulum sebelumnya karena lebih berpusat kepada siswa, dimana dalam kurikulum sebelumnya siswa hanya mengikuti apa yang guru ajarkan. Dalam kurikulum 2013 siswa bisa berperan aktif dalam mencari, mengembangkan, dan menemukan hal-hal baru dalam proses pembelajaran.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan kurikulum 2013. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang menyebabkan sesuatu menjadi berkembang, maju dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan faktor penghambat merupakan hal-hal yang mempengaruhi sesuatu atau bahkan menghentikan sesuatu.

### a. Faktor Pendukung

Bagian ini mendeskripsikan dan membahas tentang hal-hal yang mendukung terlaksananya implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro. Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum 2013 dapat dirumuskan berdasarkan petikan wawancara berikut

“...yang paling penting itu ya semangat belajar dari guru maupun siswa untuk lebih berkembang dan memahami kebijakan kurikulum 2013 ini. Selain itu sosialisasi dan diklat yang dilakukan Dinas Pendidikan juga sangat membantu implementasi program ini walaupun belum maksimal. ...”  
(Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Selain semangat belajar yang tinggi dari guru maupun siswa kelengkapan fasilitas merupakan faktor pendukung utama, hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi seperti berikut:

“...fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 ini, karena dengan didukung fasilitas yang baik maka nantinya proses belajar mengajar juga akan berjalan dengan lancar. Dana juga penting dalam implementasi kurikulum 2013 karena tanpa dana kami rasa sulit untuk mewujudkan kurikulum 2013 karena dalam menyediakan buku paket untuk kurikulum 2013 ini membutuhkan dana yang tidak sedikit...” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Pendapat lain yang mendukung pentingnya fasilitas yang baik guna menunjang kebijakan kurikulum 2013 disampaikan oleh

Waka Sarana Prasarana seperti berikut:

“Ya fasilitas yang baik itu seperti adanya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan fasilitas penunjang lainnya sangat penting bagi proses pembelajaran. Tanpa fasilitas yang baik proses belajar mengajar tidak akan bisa maksimal sebaik apapun sistem dan kurikulum yang digunakan...” (Wawancara Bapak Sudiro, Waka Sarana dan Prasarana SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Pendapat lain yang beranggapan bahwa buku paket merupakan faktor pendukung utama dalam implementasi kurikulum 2013 disampaikan oleh Ibu Anik selaku guru kelas VII seperti berikut:

“...buku paket itu yang menurut saya paling penting, karena materi pembelajaran dari kurikulum 2013 bersumber pada buku paket. Tanpa buku paket proses belajar mengajar tidak bisa terlaksana. Media pembelajaran juga penting yang dapat mendukung model pembelajaran kurikulum 2013 yaitu model aplikasi...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Dari petikan wawancara diatas dapat dideskripsikan bahwa faktor pendukung dari implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro adalah adanya semangat dan kemauan baik

dari guru serta siswa untuk terus belajar dan memahami kurikulum 2013 agar mampu menerapkannya dengan baik. Diklat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga berperan penting dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013, karena sosialisasi yang telah dilakukan hanya memberikan gambaran dasar bagi guru dan semua pihak yang terlibat tentang kurikulum 2013 sehingga dengan Diklat guru menjadi lebih paham dengan kurikulum 2013. Fasilitas yang baik juga dibutuhkan guna implementasi kebijakan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan efektif. Dana juga sangat penting bagi implementasi kebijakan kurikulum 2013 karena dari dana nantinya kebutuhan dan kelengkapan untuk proses belajar mengajar dapat terpenuhi, seperti dana dapat digunakan untuk membeli buku paket yang menjadi komponen utama dalam proses pembelajaran kurikulum 2013 karena buku paket merupakan sumber materi dari proses belajar mengajar tanpa buku paket ini kurikulum 2013 tidak dapat dijalankan.

#### **b. Faktor Penghambat**

Bagian ini mendeskripsikan dan membahas tentang masalah kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro. Faktor penghambat implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro dapat dirumuskan

dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan implementasi kebijakan kurikulum 2013.

“...kalau untuk faktor penghambatnya sendiri itu ya berawal dari belum siapnya kami mengimplementasikan kurikulum 2013 karena terlalu mendadak, dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Guru dan siswa juga masih menggunakan metode pembelajaran lama yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Sekolah kami juga masih kekurangan sarana prasarana yang mendukung khususnya sarana media seperti LCD dan Laptop...” (Wawancara Bapak M. Mahfut Santoso, Waka Kurikulum SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 26 Maret 2018)

Kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi faktor penghambat juga diikuti dengan belum mampunya siswa dan guru mengoperasikan perangkat IT seperti yang diutarakan Ibu Dewi seperti berikut:

“...kurangnya sosialisasi kurikulum 2013 yang diberikan Dinas Pendidikan menjadikan guru susah memahami kurikulum 2013. Input siswanya menjadi penghambat karena memang rata-rata siswa sedikit susah mengikuti pembelajaran dengan kurikulum 2013 karena sebelumnya sewaktu di sekolah dasar mereka menggunakan kurikulum KTSP. Banyak guru dan siswa juga yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer...” (Wawancara Ibu MK. Dewi, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu Anik mengenai belum mampunya guru dan siswa mengoperasikan perangkat IT dan terbatasnya peralatan sehingga harus digunakan secara bergantian.

Sebagaimana petikan wawancara berikut:

“...hambatannya itu masih banyak guru yang belum bisa memakai laptop dan LCD jadi masih harus meminta bantuan kepada guru lain/ dari pihak sarana prasarana untuk mengoperasikan perangkat tersebut. Belum lagi LCD nya

masih harus bergantian dengan kelas lain jadi kalau LCD sedang digunakan terpaksa kelas lain tidak bisa memakai LCD untuk proses belajar mengajar. kurikulum 2013 ini pada dasarnya kan menuntut siswa untuk aktif dan mampu mencari sendiri materi yang akan diajarkan tapi pada kenyataannya kebanyakan siswa malas untuk mencari tahu sendiri...” (Wawancara Ibu Anik Nurhayati, Guru Kelas VII SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 27 Maret 2018)

Berbeda dengan yang dirasakan siswa, menurut siswa hambatan dalam kurikulum 2013 adalah semakin lamanya jam belajar mengajar dan tidak adanya akses internet, seperti yang dikatakan salah satu siswa dalam petikan wawancara berikut:

“...jam belajarnya jadi lama dan tugasnya juga jadi lebih banyak terus kadang susah kalau mau mencari tahu sendiri tentang materi apalagi dirumah tidak punya laptop dan internet...” (Wawancara dengan Agus Supriyadi, Siswa Kelas VII-A SMPN 2 Sukomoro pada tanggal 28 Maret 2018)

Dari petikan wawancara diatas dapat diketahui bahwa beberapa faktor penghambat implementasi kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru dan siswa yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai kurikulum 2013 karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pihak terkait. Guru dan siswa sebagian besar juga belum mampu mengoperasikan media informasi seperti laptop dan LCD dimana media ini sangat penting dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 yang berbasis aplikasi. Guru dan siswa juga masih menggunakan metode pembelajaran lama yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013. Siswa juga mengeluhkan jam pelajaran dalam kurikulum 2013 menjadi lebih lama sehingga

siswa merasa lelah dalam mengikuti jam belajar mengajar dan tugas yang diberikan juga memberatkan siswa. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor penghambat. Sarana dan prasarana di SMPN 2 Sukomoro yang dapat menunjang implementasi kurikulum 2013 masih kurang sehingga dalam proses belajar mengajar sarana prasarana harus digunakan secara bergantian.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan**

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan negara. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut pemerintah harus membuat suatu peraturan yang berisi pedoman dan strategi yang berguna untuk mencapai tujuan. Pedoman atau strategi yang dibuat pemerintah guna mencapai tujuan disebut dengan kebijakan publik. Kebijakan publik ini sendiri merupakan produk atau bagian dari administrasi publik, dimana administrasi publik merupakan pemerintah yang berperan sebagai regulator yang berperan aktif dan berinisiatif dalam mengambil langkah-langkah yang baik bagi kehidupan rakyat. Salah satu tujuan pemerintah yang paling utama adalah untuk membangun Bangsa Indonesia. Salah

satu cara membangun bangsa adalah dengan memajukan bidang pendidikannya.

Memajukan pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan membuat terobosan-terobosan baru dan aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan yang disebut kebijakan pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan baik. Kebijakan Pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan dibidang pendidikan, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Bangsa Indonesia di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan ini dibuat oleh pemerintah pusat. Kebijakan bidang pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan sistem pendidikan dengan menggunakan kurikulum 2013 (K-13). Kurikulum 2013 pada dasarnya sama dengan kurikulum sebelumnya hanya saja ada penambahan penilaian sikap peserta didik dan struktur kurikulum. Tujuan dari penambahan penilaian sikap adalah agar nantinya setelah lulus peserta didik tidak hanya menguasai kompetensi pengetahuan

dan ketrampilan tetapi juga menjadi siswa yang berkarakter dan berguna bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro) mengacu pada proses implementasi kebijakan public yang disampaikan oleh Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. Sehingga pembahasan pada implementasi kebijakan kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan (Studi pada SMPN 2 Sukomoro) disesuaikan dengan ketiga tahapan proses implementasi kebijakan publik menurut Widodo tersebut.

#### **a. Tahap Interpretasi**

Tahap interpretasi adalah tahap dimana sekolah yang melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 harus mampu menjabarkan peraturan kebijakan kurikulum 2013 dari Pemerintah Pusat agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh sekolah yang melaksanakannya. Peraturan yang terdapat dalam kurikulum 2013 harus diterapkan oleh seluruh aspek pendidikan di sekolah agar tujuan dari kebijakan kurikulum 2013 dapat tercapai. Begitu pula dengan SMPN 2 Sukomoro yang dalam pengelolaan sekolah memiliki empat bidang yang berada di bawah Kepala Sekolah, yakni Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Hubungan

Masyarakat, dan Bidang Sarana Prasarana. Setiap bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah ini masing-masing memiliki *Standart Operating Prosedure* (SOP) yang akan menjadi panduan atau pedoman bagi pelaksanaan kurikulum 2013. SOP ini dibuat Bersama-sama oleh wakil kepala sekolah pada bidang masing-masing dan kepala komite sekolah serta pengawas yang berperan sebagai pengembang kurikulum. Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro terdapat dua dokumen utama yang memuat aturan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk para guru yaitu Dokumen Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 dan Panduan Akademik.

#### **1) Dokumen Kurikulum Gabungan KTSP dan Kurikulum 2013**

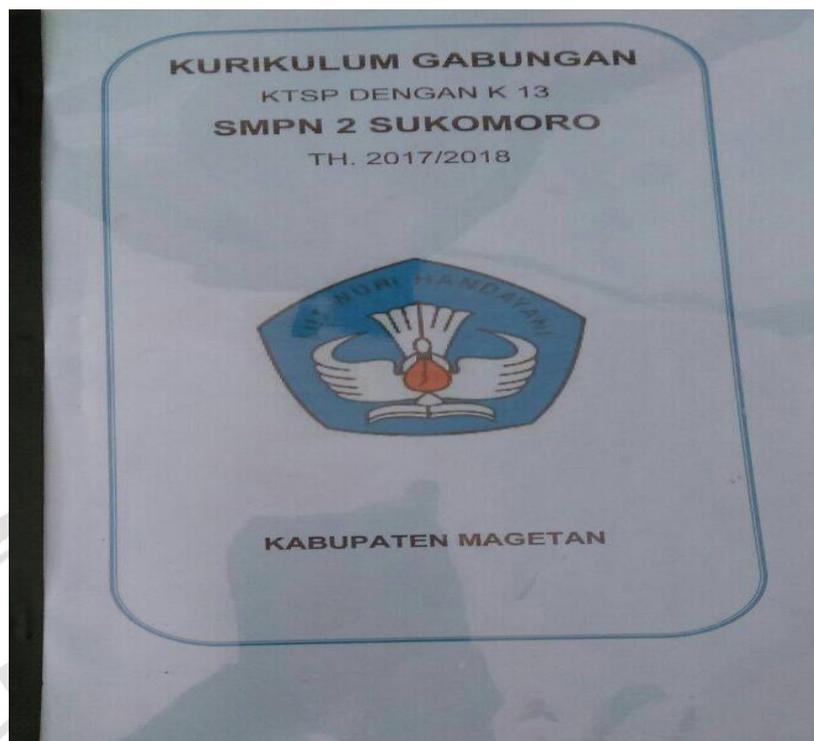
Dokumen Kurikulum gabungan KTSP dan kurikulum 2013 merupakan dokumen pengembangan kurikulum yang disusun setiap awal tahun ajaran baru sebagai pedoman bagi warga sekolah dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, dan memberikan pelayanan yang baik kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan kompetensi pada diri siswa. Dokumen ini disusun oleh tim pengembang kurikulum SMPN 2 Sukomoro, dengan pertimbangan dari komite sekolah dan

bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magetan. Dimana dalam penyusunan dokumen ini harus mendapat pengesahan pada tingkat provinsi.

Dokumen kurikulum gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 SMPN 2 Sukomoro ini diantaranya berisi:

1. Pengembangan kurikulum, yang meliputi latar belakang, landasan hukum, dan tujuan pengembangan kurikulum;
2. Tujuan satuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan dasar, visi sekolah, misi sekolah, dan tujuan sekolah;
3. Struktur dan muatan kurikulum, yang meliputi struktur KTSP dan Kurikulum 2013 (Penjelasan pelaksanaan pada: mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global);
4. Kalender pendidikan, yang berisi jadwal kegiatan pendidikan akademik selama setahun kedepan.

Sumber: Dokumen kurikulum gabungan KTSP dan Kurikulum 2013 Tahun 2017/ 2018



**Gambar 4.4 Dokumen Gabungan Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/2018**

Sumber: Arsip Bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomoro

## 2) Buku Panduan Akademik

Buku Panduan Akademik juga menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di SMPN 2 Sukomoro selain dokumen kurikulum gabungan KTSP dan kurikulum 2013 bagi para pendidik untuk melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pedoman penyusunan Buku Panduan Akademik ini diturunkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sehingga para tenaga pendidik dapat melaksanakan prosedur yang sama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Adapun penyusunan Buku Panduan Akademik di SMPN 2 Sukomoro diawali dengan kesepakatan terhadap unsur-unsur yang akan dimasukkan kedalam buku panduan, pencarian dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas guru, penyusunan dan revisi jadwal pelajaran, penyusunan program kerja kurikulum, dan terakhir penyempurnaan buku panduan.

Buku Panduan Akademik disusun oleh bagian kurikulum dan akan diperbarui tiap tahunnya dan kemudian disampaikan kepada seluruh pegawai sekolah pada tiap awal tahun ajaran baru. Dalam Buku Panduan Akademik ini memuat prosedur sesuai ketentuan kurikulum 2013 yang sudah dilaksanakan, adapun isi dari Buku Panduan Akademik diantaranya:

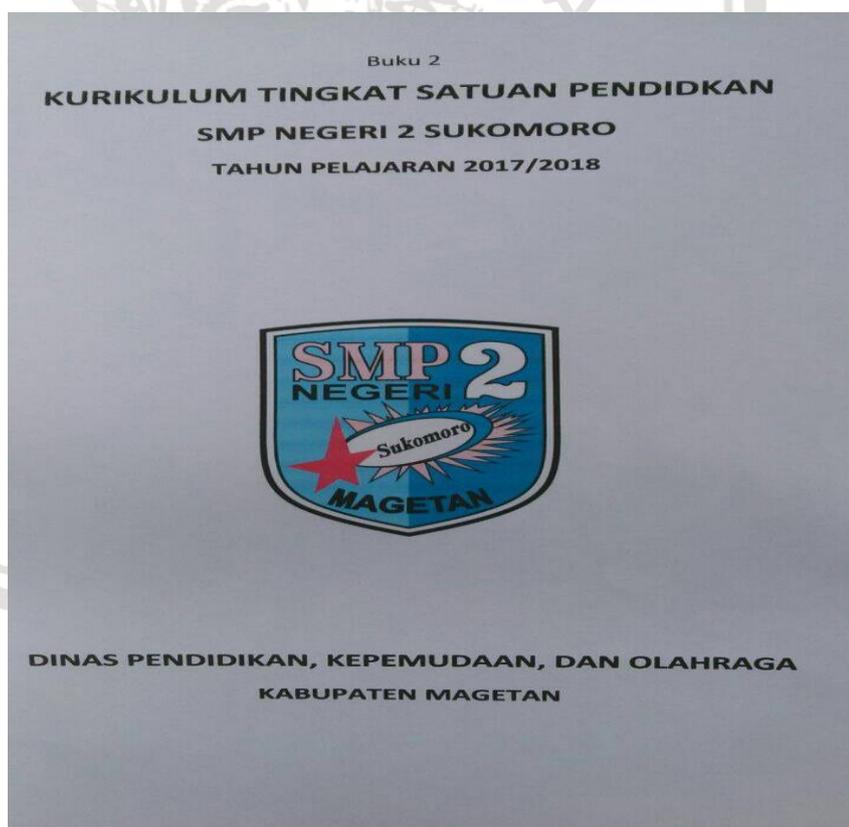
1. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus dan RPP di Buku Panduan Akademik meliputi:
  - a. Standar kompetensi;
  - b. Kompetensi dasar;
  - c. Materi pembelajaran;
  - d. Kegiatan pembelajaran;
  - e. Indikator;
  - f. Penilaian;

- g. Alokasi waktu;
- h. Sumber/ bahan/ alat belajar.

2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru pelajaran di satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama.

*Sumber:* Buku Panduan Akademik SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/ 2018



**Gambar 4.5** Buku Panduan Akademik SMPN 2 Sukomoro Tahun 2017/ 2018

Sumber: Arsip Bidang Kurikulum SMPN 2 Sukomoro

## **b. Tahap Pengorganisasian**

Tahap pengorganisasian merupakan sebuah tahapan dimana organisasi melakukan hal-hal yang memfasilitasi pelaksanaan suatu kebijakan. Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, persiapan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana, dan yang terakhir adalah aturan. Begitu pula dengan SMPN 2 Sukomoro yang melakukan pengorganisasian diantaranya:

### **1) Sosialisasi**

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 dilakukan dengan mencari tahu terlebih dahulu karakteristik dari Kabupaten Magetan dalam proses implementasi tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan studi pada SMPN 2 Sukomoro diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan diawali dengan proses sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang baru akan melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini. Pelaksanaan kurikulum 2013 dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dengan mengundang perwakilan dari sekolah-sekolah tingkat menengah pertama di Kabupaten Magetan, perwakilan yang diundang adalah

dari bagian kurikulum sekolah. Sosialisasi ini dilakukan hanya satu hari dan dilakukan secara klasikal dimana seluruh perwakilan sekolah dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diberi sosialisasi mengenai kebijakan kurikulum 2013. Sosialisasi untuk masing-masing SMP kemudian akan disampaikan oleh perwakilan kurikulum dari masing-masing sekolah kepada seluruh pegawai sekolah. Singkatnya waktu dan kurang jelasnya materi yang diberikan dalam sosialisasi membuat kurangnya pemahaman dari para pelaksana kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro.

## 2) Pendidikan dan Pelatihan

Langkah selanjutnya yang diambil Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan setelah melaksanakan sosialisasi adalah melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pelaksana kebijakan kurikulum 2013. Diklat ini ditujukan untuk para guru yang mengajar kelas VII dengan kurikulum 2013. Pelaksanaan diklat tidak sama dengan sosialisasi jika saat sosialisasi dilakukan secara klasikal, diklat dilakukan dengan mengelompokkan para guru sesuai mata pelajaran yang diampu di sekolahnya masing-masing. Pelaksanaan diklat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan dirasa kurang oleh para guru karena singkatnya alokasi waktu diklat yang hanya dilakukan selama satu minggu sehingga

materi yang diberikan kurang mendalam dan hanya seputar pengetahuan umum tentang kurikulum 2013 yang mengakibatkan para guru kurang memahami bagaimana sebenarnya kurikulum 2013 itu sendiri.

### 3) Sumber Daya

Implementasi kurikulum 2013 harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam implementasi kurikulum 2013 meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana.

Sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum 2013 di SMPN 2 Sukomoro sudah mencukupi dilihat dari data yang diperoleh dengan jumlah pegawai dari SMPN 2 Sukomoro yang meliputi Kepala Sekolah, Guru PNS, Guru Non PNS, Pegawai TU PNS, Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah 40 orang. Namun jika dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di SMPN 2 Sukomoro masih sangat kurang. Dikatakan kurang karena sebagian besar guru yang mengajar di SMPN 2 Sukomoro tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer, sementara dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 diperlukan kemampuan untuk mengoperasikan perangkat komputer karena merupakan salah satu media penting dalam proses belajar menggunakan kurikulum 2013 yang berbasis aplikasi.

Sumber daya manusia dengan kemampuan dan keahlian yang baik sangat dibutuhkan guna terlaksananya suatu kebijakan dengan baik dan efektif. Guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan pelatihan

Pelatihan ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan individu dalam bidang pengetahuan, ketrampilan dan sikap;

2. Pendidikan

Pendidikan diberikan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam artian formal yang berguna untuk peningkatan karir;

3. Pembinaan

Pembinaan dilakukan guna membuat sumber daya manusia agar mampu taat kepada aturan yang ada;

4. *Recruitment*

*Recruitment* dilakukan guna mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan klasifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menjadikan sumber daya manusia memiliki kemampuan yang baik dapat membuat suatu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien.

Sumber daya sarana dan prasarana juga merupakan elemen penting selain sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013. SMPN 2 Sukomoro sendiri sudah memiliki sarana prasarana yang sebagian besar sudah layak untuk melaksanakan kebijakan kurikulum 2013 ini dilihat dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang multimedia dan ruang lain yang dapat menunjang kurikulum 2013 sudah tersedia namun dari hasil penelitian masih ada beberapa sarana prasarana yang belum terpenuhi yaitu LCD dan laptop. Dimana SMPN 2 Sukomoro hanya memiliki satu LCD dan laptop sementara ada dua kelas yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan kurikulum 2013 sehingga LCD harus digunakan secara bergantian dan guru harus membawa laptop sendiri sehingga membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif.

Sumber daya yang tidak kalah penting adalah sumber dana yang dapat menunjang terlaksananya kurikulum 2013. Dari hasil penelitian diketahui SMPN 2 Sukomoro sendiri sudah memiliki sumber dana yang cukup, sumber dana tersebut didapatkan dari tiga pihak yaitu dari pihak pemerintah, bantuan dari wali murid, dan iuran sukarela dari guru. Dengan demikian untuk sumber dana sudah mencukupi untuk bantuan membiayai kegiatan operasional dan belajar mengajar dengan kurikulum 2013.

#### 4) Aturan

Dalam tahapan pengorganisasian aturan berperan memberikan rambu-rambu atau pedoman bagi implementasi sebuah kebijakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada, guna menjaga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dengan kebijakan kurikulum 2013 juga memiliki aturan dalam setiap aspeknya, adapun landasan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahunan (Perpres Nomor 5 Tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sumber: Widyastono (2014)

Pengembangan kurikulum yang akan dilakukan tiap tahunnya akan dilakukan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahun ajaran 2017/2018 SMPN 2 Sukomoro dalam melakukan pengembangan kurikulum berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179432/MPK/KR/2014 tentang pemberhentian pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
4. SK Nomor: 253/KEP.D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017;
5. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikbud Nomor 420/176/Sj dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 sebagai tindak lanjut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
6. Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013;

7. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pramuka sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
9. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru, Teknologi Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013;
10. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
11. Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

Sumber: Dokumen Kurikulum SMPN 2 Sukomoro

### c. Tahap Aplikasi

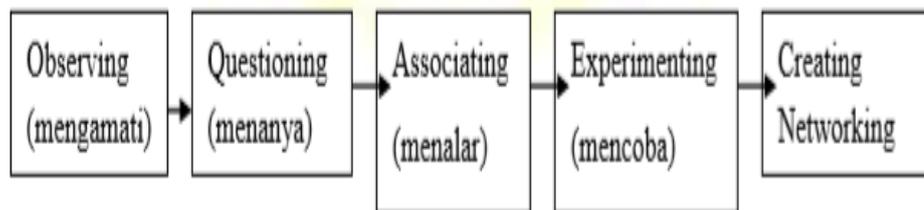
Tahap aplikasi merupakan tahap dari pelaksanaan pembelajaran yakni dengan menerapkan kurikulum 2013. Penerapan pembelajaran pada dasarnya sangat bergantung kepada kemampuan guru dalam mengarahkan kemampuan siswa, kreativitas siswa, penggunaan sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran termasuk

penggunaan internet. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013 guru tidak lagi menjadi pusat dalam pembelajaran melainkan siswa harus mampu mencari sumber belajar sendiri selain dari guru dan buku modul.

### 1) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 sebenarnya tidak berbeda jauh dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP, dimana guru tetap melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dan silabus yang telah disusun sebelumnya, sesuai jadwal yang telah ditentukan bidang kurikulum hanya berbeda pada metode pembelajarannya saja.

Kebijakan kurikulum 2013 dalam proses pelaksanaan pembelajarannya menggunakan pendekatan *scientific* dimana selama proses pembelajaran guru hanya sebagai mediator yang bertugas untuk mengarahkan siswa untuk memahami pelajaran yang diajarkan. Guru menjadi pasif dan siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri karena pendekatan yang digunakan adalah *scientific*. Pendekatan *scientific* adalah pendekatan yang dalam proses pembelajarannya menggunakan metode 5M yang dapat dijelaskan seperti gambar dibawah ini



**Gambar 4.6 Tahapan Pendekatan *Scientific***

Sumber: Paparan Wamendik hal 17

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum 2013 juga tidak lepas dari proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa selama proses belajar mengajar. Namun dalam penelitian ditemukan bahwa guru masih merasa keuslitan dalam melakukan penilaian diakrenakan kurang pemahnyanya guru bagaimana menilai dengan baik dan benar menggunakan ketentuan kurikulum 2013 karena ada begitu banyak aspek penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 dimana dalam aspek penilaian memiliki format penilaian yang berbeda-beda dan kurangnya Diklat yang diberikan oleh dinas terkait. Guru juga dituntut untuk melakukan observasi secara mendalam, penilaian secara lisan, tulisan, tugas portofolio, dan memberikan tugas untuk siswa untuk membuat sebuah produk dari materi yang telah diajarkan.

## 2) Penerimaan Siswa Terhadap Kurikulum 2013

Penerimaan siswa terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013 juga bisa dijadikan penilaian apakah kurikulum

2013 yang memang dibuat untuk lebih menjadikan siswa tidak hanya pintar dalam mata pelajaran tetapi juga memiliki karakter yang berguna bagi siswa ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat sudah diajalkan secara efektif atau belum. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sebenarnya siswa siap tidak siap memang diwajibkan untuk melaksanakan kurikulum 2013 karena sudah diwajibkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya sendiri siswa mengalami bebrapa kendala karena belum paham betul bagaimana sebenarnya kurikulum 2013 itu dijalankan karena siswa tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan begitu proses belajar mengajar dimulai langsung menggunakan kurikulum 2013. Siswa juga merasa keberatan dengan lebih lamanya jam pelajaran serta banyaknya tugas yang diberikan. Namun siswa juga senang dengan kurikulum 2013 karena siswa bisa mengeluarkan pendapatnya dan bisa melatih kepercayaan diri.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013**

Implementasi kebijakan kurikulum 2013 tentunya memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung implementasi kurikulum 2013 merupakan hal-hal yang membuat implementasi kurikulum 2013 menjadi maju, berkembang, dan lebih baik lagi. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013

merupakan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah dan menghentikan terlaksananya kurikulum 2013.

#### **a. Faktor Pendukung**

Dalam penelitian ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 diantaranya semangat dan kemauan dari guru dan siswa untuk belajar lebih lagi untuk memahami kurikulum 2013. Kemudian Diklat yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan menjadikan guru lebih paham tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 dalam proses belajar mengajar. Buku paket yang menjadi bahan ajar dan sumber belajar bagi siswa sangat penting karena semua materi kurikulum 2013 terdapat dalam buku paket ini. Sumber dana yang cukup juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013. Sumber dana ini didapat dari tiga sumber yaitu Pemerintah yang biasa disebut Biaya Operasional Sekolah (BOS), iuran dari anggota komite sekolah, dan iuran sukarela dari guru.

#### **b. Faktor Penghambat**

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 diantaranya, kurangnya sosialisasi yang diberikan

oleh Dinas Pendidikan sehingga guru yang bertindak sebagai tenaga pengajar dan siswa yang menerima pembelajaran kurang memahami kurikulum 2013 sehingga tidak bisa memahami materi secara mendalam. Guru dan siswa belum bisa mengoperasikan perangkat komputer yang menjadi alat bantu utama dalam kurikulum 2013 yang berbasis aplikasi juga menjadi faktor penghambat. Guru dan siswa juga masih terbiasa menggunakan metode pembelajaran lama sehingga tidak sesuai dengan pola mengajar kurikulum 2013. Lebih lamanya jam pembelajaran juga menjadi faktor penghambat, dikarenakan siswa merasa lelah dan sulit berkonsentrasi. Selain itu keterbatasan sumber daya dalam sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan kurikulum 2013 seperti kurangnya perangkat penunjang pembelajaran seperti LCD dan laptop membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu dikarenakan LCD dan laptop harus digunakan secara bergantian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diawal, maka Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 di Kabupaten Magetan yang menggunakan beberapa indikator yang disampaikan oleh Charles O. Jones dalam Widodo (2012:91) dalam pengimplementasiannya yaitu tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena walaupun sudah menerapkan seluruh tahap namun masih memiliki kekurangan dalam beberapa proses dalam tahapan tersebut, seperti pada proses:
  - a. Sosialisasi kebijakan kurikulum 2013 belum dapat diterima dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari kurang pahamiannya guru-guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013 karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan hanya mengundang wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai perwakilan sekolah yang melaksanakan kebijakan kurikulum 2013.

- b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berjalan cukup baik dimana melalui Diklat ini mampu memberikan gambaran umum bagaimana nantinya guru harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013. Meskipun dalam Diklat masih terdapat kekurangan yaitu berupa terlalu singkatnya alokasi waktu dalam Diklat yang dilaksanakan hanya dalam waktu satu minggu.
- c. Sumber daya terkait implementasi kebijakan kurikulum 2013 mencakup tiga sumber daya yaitu: sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana. Sumber daya manusia dalam implementasi kurikulum 2013 dilihat dari jumlahnya sudah mencukupi dengan total 40 tenaga kerja, tetapi dari segi kemampuan dalam mengoperasikan perangkat komputer sangat kurang karena banyak guru dan murid yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer. Sarana dan prasarana sendiri sudah cukup baik dengan tersedianya fasilitas yang mendukung namun masih memiliki beberapa kekurangan seperti LCD yang hanya berjumlah satu buah dan Laptop. Implementasi kurikulum 2013 akan berjalan baik dengan adanya Sumber daya dana, dana untuk kurikulum 2013 ini berasal dari pemerintah, bantuan wali murid, dan iuran sukarela dari guru.
- d. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 berjalan kurang baik dimana dalam kurikulum 2013 guru hanya menjadi moderator dan siswa harus lebih aktif namun kenyataannya guru dan siswa masih banyak menggunakan metode pembelajaran kurikulum

sebelumnya, yaitu guru menerangkan dan siswa pasif. Penilaian dalam kurikulum 2013 juga menjadi hal yang menyulitkan bagi guru karena banyaknya aspek penilaian yang digunakan.

- e. Penerimaan siswa terhadap kurikulum 2013 kurang baik, hal ini terlihat dari banyak siswa yang mengeluhkan jam belajar dalam kurikulum 2013 yang terlalu lama sehingga membuat siswa sulit untuk berkonsentrasi.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kurikulum 2013

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan adalah:

### a. Faktor Pendukung

1. Semangat dan kemauan yang kuat dari guru dan siswa yang mau belajar untuk memahami kurikulum 2013;
2. Pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan;
3. Ketersediaan buku paket sebagai bahan ajar dan sumber belajar;
4. Sumber dana yang mencukupi.

### b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan;

2. Sumber daya manusia yang tidak bisa mengoperasikan perangkat komputer yang menjadi alat dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013;
3. Guru dan siswa masih menggunakan metode belajar kurikulum terdahulu dalam kegiatan belajar mengajar dan lamanya jam belajar mengajar membuat siswa susah berkonsentrasi;
4. Terbatasnya sarana prasarana yang menunjang implementasi kebijakann kurikulum 2013, seperti kurangnya LCD dan laptop sehingga harus digunakan secara bergantian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan untuk SMPN 2 Sukomoro dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Dinas pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menggalakan lagi sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Kependidikan, sehingga tidak ada lagi keterbatasan pengetahuan dan ketidakpahaman konsep kurikulum 2013;
2. SMPN 2 Sukomoro mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pelatihan dibidang pengoperasian perangkat komputer untuk guru dan siswa agar nantinya guru tidak kesulitan dalam memberikan pembelajaran dengan kurikulum 2013 yang sudah berbasis aplikasi dan siswa tidak kesulitan mengikuti pembelajaran dan mencari sumber pembelajaran yang berbasis aplikasi;

3. Guru SMPN 2 Sukomoro harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan sesuai dengan kurikulum 2013 agar siswa tidak merasa bosan dan bisa berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran;
4. Dinas Pendidikan dapat memberikan tambahan modul dan perbaikan sarana prasarana sekolah harus dimaksimalkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Imran. 1995. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Jatim, 2017. *Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*. (<https://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/78>, diakses tanggal 14 Desember 2017)
- Badan Pusat Statistik Kab. Magetan, 2017. *Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Magetan*. (<https://magetankab.bps.go.id/pencarian.html?searching=luas+wilayah+administrasi+kabupaten+magetan&yt1>, diakses tanggal 29 Maret 2018)
- Dapo Dikdasmen. 2017. *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah SMP N 2 Sukomoro*. (<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/E83A70C1BE69B8839CB7>, diakses pada 15 Desember 2017)
- Data Kemendikbud. 2017. *Data Penduduk Berdasarkan Sumber Data Kabupaten Magetan*. ([http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode\\_wilayah=051000&tahun=&tabs=statistik](http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=051000&tahun=&tabs=statistik), diakses pada 15 Desember 2017)
- Degibson Siagian, Sugiarto. 2000. *Metode Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Press.

- Hamalik, Oemar. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kajian Teori, 2013. *Kebijakan Pendidikan: Pengertian Kebijakan Pendidikan*. (<http://www.kajianmakalah.com/2013/03/kebijakan-pendidikan-pengertian-kebijakan-pendidikan.html>, diakses tanggal 14 Desember 2017)
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gavamedia
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*. Beverly Hill: Publication.
- Miless, Matthew B and Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- , 2008. *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- , 2012. *Public policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Paparan Wakil Menteri Pendidikan RI. 2014. *Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013*. (<https://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik>. Diakses tanggal 5 April 2018)
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Abdul Solihin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Analisis Konsep Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).

-----, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Widyastono, Herry. 2014. *Pengembangan Kurikulum di era Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara



# LAMPIRAN



## Lampiran 1

### Panduan Wawancara

Informan :

Status Informan :

Tanggal wawancara :

Instansi :

#### Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013

1. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum 2013?
2. Adakah kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh dinas terkait tentang kebijakan kurikulum 2013 sebelum dilaksanakan di SMPN 2 Sukomoro?
3. Apakah ada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diberikan mengenai pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 oleh dinas terkait?
4. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tentu memerlukan kesiapan dari berbagai elemen yang dapat menunjang implementasi kurikulum 2013. Lalu bagaimana kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber dana dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 ini?
5. Adakah standar prosedur yang dijadikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 ini?
6. Bagaimana pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 di SMPN 2 sukomoro?
7. Bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran setelah diterapkannya kebijakan kurikulum 2013?

8. Bagaimanakah penerimaan siswa terhadap implementasi kebijakan kurikulum 2013?
9. Apa sajakah faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013?
10. Apa sajakah faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013?



## Lampiran 2



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia  
Telp : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227  
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3525 /UN10.F03.11.11/PN/2018  
Lampiran :-  
Hal : Riset/Survey  
Kepada : Yth. Kepala Sekolah SMPN 2 Sukomoro  
Desa Tambakmas Kecamatan Sukomoro  
Kabupaten Magetan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Tisha Windianty Kusuma Putri  
Alamat : Desa Tamanan RT 02/ RW 01 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan  
NIM : 145030100111086  
Jurusan : Administrasi Publik  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Magetan (Studi Pada SMPN 2 Sukomoro Kabupaten Magetan)  
Lamanya : 1 (satu) Bulan  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 13 Maret 2018  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

  
**Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk:

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

### Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
**SMP NEGERI 2 SUKOMORO**  
Ds. Tambakmas – Sukomoro – Magetan. Telp. ( 0351 ) 892893  
E-mail : [smpdua\\_skm@yahoo.co.id](mailto:smpdua_skm@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN**  
No. 070 / 42 / 403.101.40 / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra. SRI HARI SUYANTI, M.Pd  
NIP. : 19630223 198803 2 005  
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I / IV b  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : SMP Negeri 2 Sukomoro

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : TISHA WINDIANTY KUSUMA PUTRI  
NIM : 145030100111086  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dengan judul “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MAGETAN**”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomoro, 10 April 2018  
Kepala Sekolah  
  
Dra. SRI HARI SUYANTI, M.Pd  
NIP. 19630223 198803 2 005

Lampiran 4



**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Januari 2014

Kepada

Nomor : 420/176/JT  
 Nomor : 0258/19K.A/KR/2014  
 Sifat : Segera  
 Lampiran :  
 Hal : Implementasi Kurikulum 2013.

Yth. 1. Gubernur  
 2. Bupati/Walikota  
 3. Ketua DPRD Provinsi dan  
 Kabupaten/Kota  
 di -  
 Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN BERSAMA**

Dalam rangka mendukung implementasi kurikulum 2013 pada Tahun 2014 dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi untuk:
  - a. mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan untuk menyiapkan anggaran penggandaan dan distribusi buku semester II sampai ke sekolah untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI;
  - b. menyiapkan dukungan anggaran untuk pelatihan guru sasaran kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI; dan
  - c. bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di tingkat sekolah bersama dengan Unit Implementasi Kurikulum (UIK).

Penyediaan anggaran untuk kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf c sudah diinformasikan untuk dialokasikan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014 sesuai Surat Mendikbud Nomor 192843/MPK.A/KR/2013 tanggal 5 Desember 2013.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk:
  - a. menyiapkan anggaran penggandaan dan pendistribusian buku semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ke sekolah untuk kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan DAK bidang Pendidikan;
  - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi menyiapkan dukungan anggaran pelatihan guru sasaran kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI; dan
  - c. menyiapkan mekanisme teknis pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tingkat sekolah bersama dengan Unit Implementasi Kurikulum (UIK).



Penyediaan anggaran untuk kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf c sudah diinformasikan untuk dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota TA 2014 sesuai Surat Mendikbud Nomor 192844/MPK.A/KRU/2013 tanggal 5 Desember 2013.

3. Dalam hal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengalokasikan anggaran pada angka 1 dan angka 2 tersebut dalam APBD TA 2014, penganggarannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2014 dengan pemberitahuan kepada DPRD, selanjutnya dilampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2014, mengingat pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GARAWAN FAUZI	 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, H. MOHAMMAD NUH
--	---

Tembusan:  
 Wakil Presiden RI, Selaku Ketua Komite Pendidikan.

Lampiran 5



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
 Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Komplek Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270  
 Telepon/Faksimile (021) 5725613  
 Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR : 288/KEP.D/KR/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013**

**TAHUN 2017**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengevaluasi satuan pendidikan yang dapat melaksanakan Kurikulum 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA KURIKULUM 2013 TAHUN 2017.
- KESATU :** Menetapkan Sekolah Dasar pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan Sekolah Menengah Pertama pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA :** Menetapkan Sekolah Menengah Atas pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT :** Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KELIMA :** Pengawasan pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT, dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 April 2017

**DIREKTUR JENDERAL,**

**TTD.**

**HAMID MUHAMMAD**

**NIP 198908121983111001**

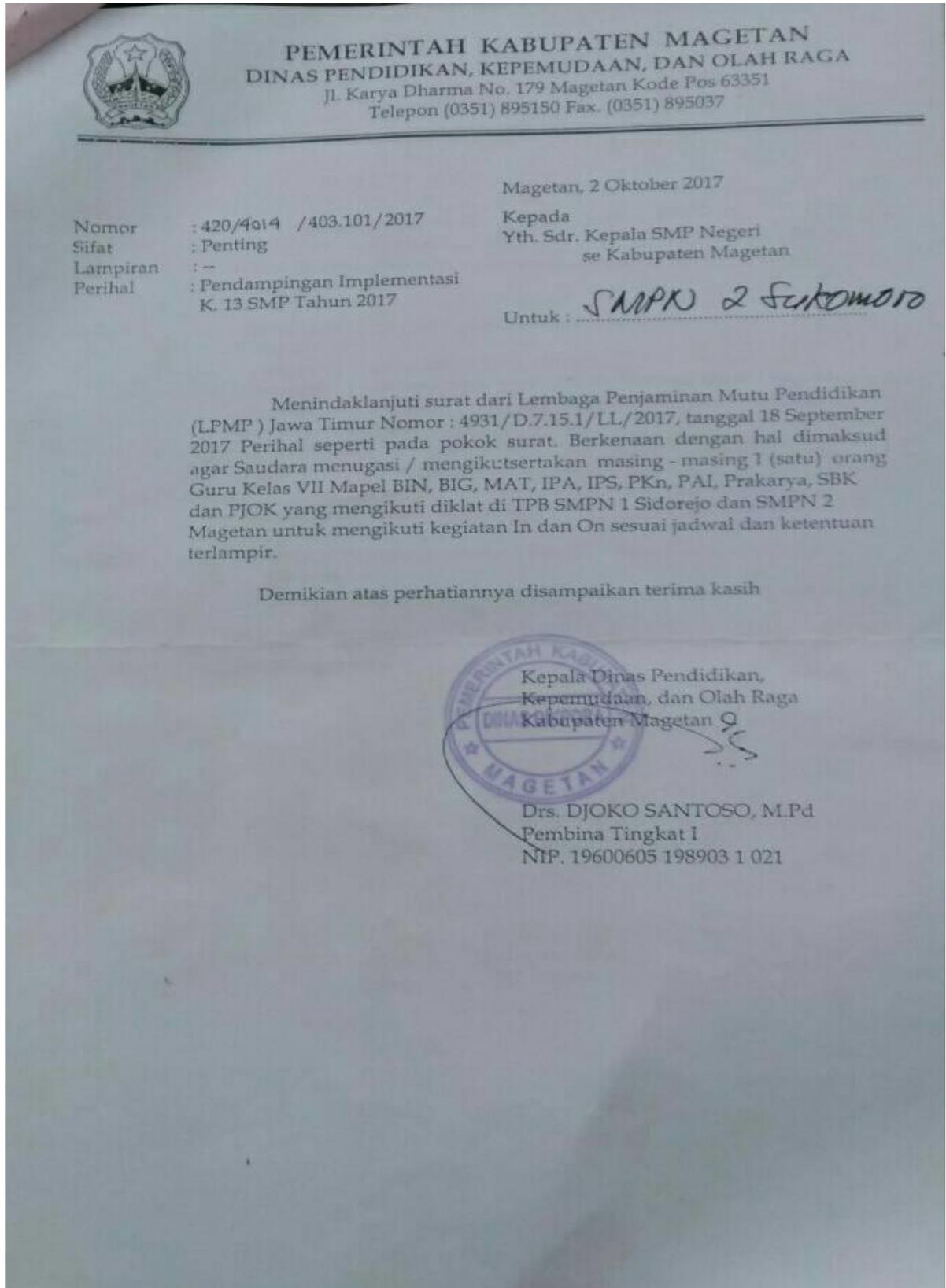
Berlaku sesuai dengan aslinya  
Kasubag Hukum  
Ditjen Ditelaahan.



**Mohamad Hartono**  
**NIP 196701101994031003**

5710	20507784	SMP N 1 KARE	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5711	20507737	SMP NEGERI 2 MEJAYAN	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5712	20507757	SMP NEGERI 1 WONOSARI	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5713	20507780	SMP NEGERI 1 PILANOKINCING	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5714	20507754	SMP NEGERI 2 BARADAN	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5715	20507752	SMP N 02 WUNGU	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5716	20507739	SMP N 2 KARE	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5717	20507751	SMP N 3 QOGER	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5718	20507783	SMP NEGERI 1 KEBONBARI	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5719	20507753	SMPN 2 BAWAHAN	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5720	20507743	SMP NEGERI 2 DOLOPO	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5721	20507781	SMP NEGERI 1 NOLAMES	KAB. MADIUN	JAWA TIMUR
5722	20509346	SMP NEGERI 2 SUKOMORO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5723	20509336	SMP NEGERI 2 PARANG	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5724	20509358	SMP NEGERI 1 KARTOHARJO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5725	20509343	SMP NEGERI 2 KARANGREJO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5726	20509350	SMP NEGERI 2 PANIKAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5727	20509342	SMP NEGERI 2 KAWEDANAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5728	20555083	SMP NEGERI 2 PONCOL	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5729	20509373	SMP NEGERI 1 NGARIBOYO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5730	20509352	SMP NEGERI 3 MAGETAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5731	20509351	SMP NEGERI 3 MAOSPATI	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5732	20509368	SMP NEGERI 1 SUKOMORO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5733	20509340	SMP NEGERI 2 MAGETAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5734	20509361	SMP NEGERI 1 BENDO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5735	20509353	SMP NEGERI 3 KAWEDANAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5736	20509339	SMP NEGERI 2 MAOSPATI	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5737	20509369	SMP NEGERI 1 PONCOL	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5738	20509372	SMP NEGERI 1 PANIKAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5739	20509357	SMP NEGERI 1 NGUNTORONADI	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5740	20509337	SMP NEGERI 1 SIDOREJO	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5741	20509371	SMP NEGERI 1 PARANG	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5742	20509344	SMP NEGERI 2 PLAOSAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5743	20509367	SMP NEGERI 1 LEMBEYAN	KAB. MAGETAN	JAWA TIMUR
5744	20517354	SMP JENDERAL BUDIRMAN KALIPARE	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5745	69938826	SMP NEGERI 2 NGAJUM	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5746	20561867	SMP NEGERI 2 KARANGPLOBO BATU ATAP	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5747	20517425	SMP QAYA BARU	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5748	20517575	SMP PORI 01 WAGIR	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5749	20517399	SMP DHARMA WANITA 02 WAJAK	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5750	20517420	SMP BRAWIJAYA	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5751	20549208	SMP NEGERI 02 WAGIR	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5752	20517467	SMP NEGERI 01 PONCOKUBUMO	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5753	20517574	SMP PORI 1 KROMENGAN	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5754	20517372	SMP PORI 01 NGANTANG	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5755	20517409	SMP DIPONEGORO TUMPAING	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5756	20566335	SMP NEGERI 4 KARANGPLOBO BATU ATAP	KAB. MALANG	JAWA TIMUR
5757	20517478	SMP NEGERI 1 BANTUR	KAB. MALANG	JAWA TIMUR

Lampiran 6



Lampiran 7

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
SMP NEGERI 2 SUKOMORO  
Ds. Tambakmas, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan Telp. ( 0351 ) 892893

---

**LEMBAR DISPOSISI**

RAHASIA	PENTING	RUTIN
---------	---------	-------

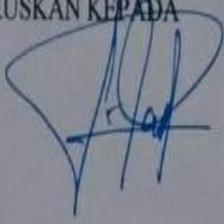
NOMOR AGENDA : 114  
TANGGAL : 4 Oktober 2017

---

PERIHAL : pendampingan implementasi K 13 SMP Th. 2017  
TGL / NO.SURAT : 2 Oktober 2017 / 420/4019/403.101/2017  
ASAL DARI : Dikpora Kab. Magetan

---

INSTRUKSI / INFORMASI DITERUSKAN KEPADA

1. Ap. Malfud 
- 2.
- 3.

## Lampiran 8

## Data Guru dan Pegawai SMPN 2 Sukomoro

No	Nama	TTL	Ijazah	Jabatan	GOL.	Pangkat GOL.
1.	Dra. Sri Hari Suyanti, M.Pd	Ngawi, 23-02-1963	S2	Ka. Sekolah	IV B	Pembina Tk. I
2.	Drs. Suprianto	Magetan, 26-10-1959	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
3.	Drs. M. Mahfut Santoso	Magetan, 06-05-1962	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
4.	Yanti Puji, S.Pd	Magetan, 07-02-1963	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
5.	Siti Jumiati, S.Pd	Magetan, 01-10-1960	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
6.	Sri Rahayu S.Pd	Magetan, 31-01-1961	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
7.	Erni Nur A, S.Pd	Ngawi, 17-06-1961	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
8.	Rus Sulistiani, S.Pd	Kediri, 23-02-1962	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
9.	Drs. R. Pramu R.	Magetan, 18-09-1963	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
10.	Priyo Yudo, S.Pd	Magetan, 23-04-1960	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
11.	Bin Yati, S.Pd	Magetan, 02-03-1962	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
12.	Bambang Eko, S.Pd	Kediri, 13-05-1962	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
13.	Dra. Yuni Hartini	Magetan, 15-06-1962	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
14.	MK. Dewi, S.Pd	Madiun, 31-10-1963	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
15.	Midiawati, S.Pd	Madiun, 12-01-1964	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
16.	Supatmi, S.Pd	Magetan, 02-06-1964	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
17.	Nanik Kun, S.Pd	Magetan, 28-02-1960	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
18.	Wasis Hermanto, S.Pd	Magetan, 18-06-1967	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
19.	Drs. Wahyu Dwiyanto	Magetan, 04-12-1964	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I
20.	Wahid Ansori, S.Pd	Magetan, 02-02-1969	S1	Guru	IV B	Pembina Tk. I

No	Nama	TTL	Ijazah	Jabatan	GOL.	Pangkat GOL.
21.	M. Qomaruddin, BA	Magetan, 13-12-1961	D3	Guru	IV A	Pembina
22.	Marsiyah, S.Pd	Magetan, 26-11-1965	S1	Guru	IV A	Pembina
23.	Sudiro	Magetan, 08-01-1966	S1	Guru	III D	Penata Tk. I
24.	Dra. Sulis Purwati	Magetan, 24-03-1968	S1	Guru	III C	Penata
25.	Anik Nurhayati, S.Pd	Magetan, 03-08-1967	S1	Guru	III C	Penata
26.	Purwantini, S.Pd	Magetan, 29-07-1970	S1	Guru	III C	Penata Muda Tk. I
27.	Yayuk Nuryani	Magetan, 24-12-1963	SMA	Staf	III B	Penata Muda Tk. I
28.	Sumarta	Magetan, 31-05-1963	SMA	Pembantu Pelaksana	III A	Penata Muda
29.	Sarimun	Magetan, 13-07-1961	SMA	Staf	II C	Pengatur Muda Tk. I
30.	Slamet Jaimin	Magetan, 19-05-1979	SD	Pembantu Pelaksana		

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

#### Data Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMPN 2 Sukomoro

No	Nama	Ijazah	Jabatan
1.	Endah Susilowati	S1	GTT
2.	Ariadi Prabowo	S1	GTT
3.	Supriyati	S1	GTT
4.	Ana Widyawati	S1	GTT
5.	Yoga Ferdiansyah	S1	GTT
6.	Suwito	SMA	PTT
7.	Bibit Mulyani	SMA	PTT
8.	Susanti	D1	PTT
9.	Rudi Basuki	SMA	PTT
10.	Puguh Sulistyono	SMA	PTT

Sumber: SMPN 2 Sukomoro (2018)

**Lampiran 9****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Curriculum Vitae (CV)

**Identitas Diri**

Nama Lengkap : Tisha Windianty Kusuma Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 145030100111086  
Program Studi/ Minat : Ilmu Administrasi Publik  
Tempat/ Tanggal Lahir : Magetan/ 28 September 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tamanan RT 02/ RW 01 Kec. Sukomoro,  
Kab. Magetan  
Nomor Telepon : 085236144428  
Email : windiantysha@gmail.com

**Riwayat Pendidikan dan Training**

1. TK Kemala Bhayangkari Magetan (2000-2002)
2. SD Muhammadiyah Magetan (2002-2008)
3. SMPN 1 Magetan (2008-2011)
4. SMAN 1 Magetan (2011-2014)
5. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2014-2018)

## Riwayat Organisasi dan Kepanitiaan

### Organisasi

Periode	Organisasi	Jabatan
2014-2015	Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB)	Bendahara II
2015-2016	Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB)	Bendahara I
2016-2017	Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB)	Ketua Divisi Humas

### Kepanitiaan

Periode	Kepanitiaan	Jabatan
2014	Brawijaya Rektor Cup (BRC)	Staff Divisi Humas
2015	Brawijaya Futsal League 2015 (BFL)	Staff Divisi Humas
2015	Brawijaya Nasional Futsal Championship (BNFC)	Bendahara Acara
2016	Brawijaya Futsal League 2016 (BFL)	Staff Divisi Acara
2016	Brawijaya Cup (BACUP)	Kadiv Konsumsi
2017	Brawijaya Futsal League 2017 (BFL)	Staff Divisi Humas

## Prestasi

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Juara 2 Futsal Putri Brawijaya Futsal League	Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB)	2015
2.	Juara 3 Futsal Putri Olimpiade Brawijaya	Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya	2015
3.	Juara 1 Futsal Putri Brawijaya Futsal League	Unit Aktivitas Sepak Bola Universitas Brawijaya (UASB)	2016
4.	Juara 3 Futsal Putri Economis Scout Talent (Se Jawa-Bali)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya	2017

**Pengalaman Kerja**

1. Staff Magang Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Daerah, periode Juli – September 2017.